



THE WORLD BANK

# Indonesia: Economic and Social update

April 2008



**PERKEMBANGAN TERKINI KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL INDONESIA**  
**April 2008**

**DAFTAR ISI**

**RANGKUMAN DAN IKHTISAR**

**BAB I: KONDISI TERKINI MAKROEKONOMI**

1. Ekonomi global kembali menghadapi krisis
2. Indonesia, seperti banyak negara Asia Timur, sejauh ini telah berhasil mempertahankan momentum pertumbuhannya meskipun terjadi penurunan ekonomi global
3. Gejolak keuangan global mulai terasa dampaknya, namun fondasi sektor keuangan Indonesia tetap kuat
4. Peningkatan harga komoditas telah membantu ekspor Indonesia, yang sedang mendiversifikasi negara tujuan dan komposisi eksportnya
5. Peningkatan harga komoditas pertanian (pangan) mengakibatkan peningkatan inflasi dalam negeri
6. Peningkatan harga bahan bakar menimbulkan kekhawatiran tentang kondisi APBN dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian
7. Melambannya pertumbuhan ekonomi dunia serta risiko yang semakin meningkat mempersulit pembuatan proyeksi hasil untuk tahun 2008 dan 2009

**BAB II: PERKEMBANGAN TERKINI MIKROEKONOMI DAN SEKTOR SOSIAL**

1. Iklim investasi Indonesia terus membaik namun masih ada beberapa bidang penting yang masih lemah
2. Fenomena “pertumbuhan tanpa lapangan kerja” mungkin berkurang dan sektor manufaktur mungkin akan lebih dinamis dari yang diperkirakan sebelumnya
3. Fokus pada program yang ditujukan bagi masyarakat miskin termasuk pada pemantauan dan evaluasi program
4. Perkembangan terbaru dalam kebijakan dan program pendidikan

**BAB III: FITUR-FITUR KHUSUS DALAM AGENDA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG INDONESIA**

1. Dampak dari konflik, tsunami, dan rekonstruksi terhadap kemiskinan di Aceh
2. Investasi dalam bidang kesehatan di Indonesia

## Pendahuluan Rangkuman

**Walaupun perkembangan ekonomi global melamban, pertumbuhan ekonomi Indonesia maju pesat mencapai puncaknya dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir ini yaitu 6.3 percent pada tahun 2007.** Laju pertumbuhan tersebut cukup untuk menurunkan kemiskinan dari 17,8 menjadi 16,6 persen berdasarkan garis kemiskinan Pemerintah RI, dan membalikarahkan kecenderungan arah pertumbuhan tanpa lapangan kerja, tingkat pengangguran berkurang dari 10,3 menjadi 9,1 persen. Pemacu pertumbuhan telah bergeser selama tahun tersebut. Selama paruh pertama, kekuatan ekonomi bersumber pada permintaan luar negeri, sedangkan selama paruh kedua kekuatan yang memacu perekonomian adalah investasi dan permintaan konsumen. Harga komoditi yang tinggi tetap mempunyai peranan penting, ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit tumbuh pesat. Inflasi pada akhir tahun berada pada ujung atas dari target inflasi pemerintah, yaitu 6,6 persen, namun setelah itu naik kembali mencapai 7,4 persen akibat harga pangan yang meningkat. Defisit APBN sebesar 1,3 persen dari PDB, sedangkan rasio hutang terhadap PDB terus menurun dengan pesat, sampai anjlok di bawah 35 persen pada akhir tahun 2007 (turun dibanding dengan 80 persen pada tahun 2000). Nilai tukar nominal melemah dalam tahun 2007, akan tetapi rupiah tetap berada dalam kisaran Rp 9.000 sampai Rp 9.500 dan menguat kembali pada awal tahun 2008.

**Gejolak keuangan global mulai terasa dampaknya.** Bursa efek Indonesia (BEI) yang berbasis komoditas menuai kinerja terbaik pada tahun 2007, BEI tumbuh 52 persen dalam tahun tersebut, dan tetap berkinerja baik sampai bulan Maret 2008 ketika ia mengalami koreksi signifikan — seperti juga dialami oleh berbagai pasar keuangan global. Demikian juga, walaupun Fitch meningkatkan peringkat utang luar negeri jangka panjang untuk Indonesia menjadi BB (tingkat spekulatif) pada bulan Februari 2008, gejolak keuangan menaikkan premi risiko internasional (naik dari titik rendah 130 bps pada pertengahan tahun 2007 menjadi 300 lebih pada tahun 2008), dan menaikkan suku bunga dalam negeri untuk pinjaman Pemerintah (dari kurang dari 9 persen pada pertengahan tahun menjadi di atas 10 persen pada tahun 2008 untuk surat utang 10-tahun).

**Harga komoditas tinggi menyebabkan sulit untuk membaca keadaan ekonomi pada permulaan tahun 2008.** Di satu pihak harga tinggi di bidang energy, pertambangan dan pertanian berdampak positif bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Misalnya, ekspor bersih minyak dan gas bumi diperkirakan sebesar US\$6,6 milyar pada tahun 2007, sedangkan ekspor batu bara, tembaga dan minyak kelapa sawit masing-masing sebesar US\$6,7, US\$7,3 dan US\$7,4 milyar. Semuanya meningkat dengan tingkatan dua digit. Komoditas-komoditas tersebut telah memberi sumbangan kepada *current account surplus* sebesar 2,6 persen pada tahun 2007. Akan tetapi di lain pihak, harga komoditas yang tinggi juga mempunyai segi negatifnya. Yang paling langsung terasa, harga komoditas pertanian yang tinggi berdampak lebih lanjut kepada harga pangan dalam negeri dengan inflasi pangan mencapai 10,4 persen dalam waktu satu tahun pada bulan Februari 2008, jauh lebih tinggi daripada inflasi menyeluruh sebesar 7,4 persen. Harga pangan yang lebih tinggi tersebut berdampak pada orang miskin, walaupun harga beras, sumbangan

terbesar dalam keranjang konsumsi orang miskin nyaris konstan sepanjang tahun yang lalu.

**Bidang penting lain yang semakin mencemaskan adalah APBN.** Dengan tidak berubahnya harga dalam negeri untuk harga bahan bakar bensin dan diesel untuk angkutan dan minyak tanah (yang mewakili lebih dari 2/3 bagian penjualan BBM), subsidi pemerintah tumbuh dengan pesat dan akan mencapai Rp 130 trilyun (US \$14.3 milyar) pada tahun 2008 berdasarkan perkiraan Pemerintah sebesar US\$95 per barrel. Pada tingkat ini, subsidi energi total (untuk tenaga listrik maupun untuk BBM) akan sama besar dengan total belanja modal dan sosial pemerintah pusat. Didorong oleh kenaikan subsidi, telah diusulkan langkah-langkah untuk memangkas belanja dalam departemen-departemen teknis, mengurangi subsidi untuk listrik, dan meransum minyak tanah untuk memastikan bahwa hanya orang miskin yang menerimanya. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah mengharapkan defisit anggaran belanja naik dari 1,7 persen PDB menjadi sedikit di atas 2 persen PDB.

**Investasi meningkat cukup tinggi pada tahun 2007**, mencapai 24,8 persen PDB, menunjukkan telah terjadi kemajuan pembaharuan dan perbaikan persepsi bisnis. Didalam upgrading peringkat Indonesia, Fitch menyebutkan peningkatan investasi tersebut sebagai akibat dari upaya Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. Mudah-mudahan peningkatan ini juga mencerminkan awal dari pembalikan arah dalam persepsi para investor global Jepang yang kembali menempatkan Indonesia kepada lokasi investasi paling diinginkan ke-8 dari tempat ke-9 pada tahun 2006, namun masih jauh di bawah tempat ke-4 pada tahun 2002.

**Pembahasan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja tentang peraturan perburuhan khususnya tentang ketentuan-ketentuan PHK belum rampung** dan pertumbuhan lapangan kerja sektor formal tetap melamban, Ketidakmampuan Indonesia untuk memaksimalkan potensi di bidang pertambangan yang luar biasa besar merupakan bidang kelemahan yang lain (terutama mengingat harga-harga yang berlaku saat ini). Tidak ada Kontrak Karya (KK) dengan perusahaan minyak besar yang ditandatangani selama 10 tahun terakhir dan suatu RUU Pertambangan yang diubah terkatung-katung di DPR.

**Melihat ke depan, dengan melambannya pertumbuhan ekonomi dunia serta risiko yang semakin meningkat, maka membuat proyeksi hasil 2008 dan 2009 menjadi lebih sulit daripada biasa.** Indonesia diharapkan dapat melalui perlambanan ekonomi global dengan cukup baik, dengan pertumbuhan melamban menjadi 6,0 persen pada tahun 2008 sebelum kembali mencapai 6,4 persen pada tahun 2009. Proyeksi-proyeksi tersebut melihat pertumbuhan ekspor melamban dari 8,0 persen pada tahun 2007 menjadi 7,0 persen pada tahun 2008 akan tetapi memperkirakan pertumbuhan dalam negeri dan terutama investasi dan konsumsi tetap mantap ketika momentum ekonomi berjalan ke tahun 2008. Dengan harga BBM internasional dan subsidi yang lebih tinggi defisit anggaran diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 2 persen dari PDB dengan rasio utang-terhadap-PDB menurun menjadi 31 persen menjelang akhir tahun 2008.

## BAB 1: KONDISI MAKROEKONOMI TERKINI

### 1. Ekonomi global kembali menghadapi krisis

Sejak pertengahan tahun 2007, krisis kredit perumahan (*sub-prime mortgage*) yang merebak di A.S. telah menyebar ke berbagai kategori aset lainnya, dan telah mengakibatkan timbulnya masalah likuiditas dan gejolak di pasar keuangan global. Dengan melonjaknya harga bahan bakar, makanan, dan komoditas lainnya di paruh kedua tahun 2007, sebuah badai tampaknya akan menimpa perekonomian global.

Walaupun Asia Timur cukup berhasil pada tahun 2007, dengan mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi selama lebih dari satu dekade, prakiraan kondisi global untuk tahun 2008 yang lebih suram merupakan sumber kekhawatiran. Prakiraan terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan turun sebesar hampir satu persen antara tahun 2007 dan tahun 2008, sedangkan pertumbuhan perdagangan dunia diramalkan turun hampir lima persen, dari 9,2 persen pada tahun 2007 menjadi 4,5 persen pada tahun 2008 (Tabel 1). Di sisi lain, harga minyak diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai harga rata-rata 86,8 dolar per barel pada tahun 2008, sedangkan harga komoditas non-minyak diramalkan meningkat lebih dari 13 persen.

**Tabel 1. Prakiraan Kondisi Global untuk tahun 2008**

	2005	2006	Perkiraan Awal 2007	Proyeksi per bulan Maret 2008
<b>Pertumbuhan PDB Riil (Perubahan % tahunan):</b>				
<b>Dunia</b>	3,4	3,9	3,6	2,7
<b>OECD</b>	2,4	2,8	2,5	1,5
<b>Amerika Serikat</b>	3,1	2,9	2,2	1,4
<b>Jepang</b>	1,9	2,2	2,1	1,5
<b>Kawasan Eropa</b>	1,5	2,8	2,7	1,6
<b>Negara-negara berkembang di     Kawasan Asia Pasifik Timur</b>	9,1	9,7	10,2	8,8
<b>Perdagangan dunia (% perubahan dalam volume)</b>	7,8	10,1	9,2	4,5
<b>Inflasi CPI G7 (% perubahan)</b>	2,0	2,0	1,7	1,7
<b>Harga minyak (Dolar AS per barel)*</b>	53,4	64,3	71,2	86,8
<b>Harga komoditas non-minyak (% perubahan)</b>	13,4	24,5	-0,7	13,4

\* Harga rata-rata minyak mentah U.K., Brent, Dubai, dan West Texas Intermediate

Sumber: World Bank Development Economics Prospects Group (preliminary, March 2008)

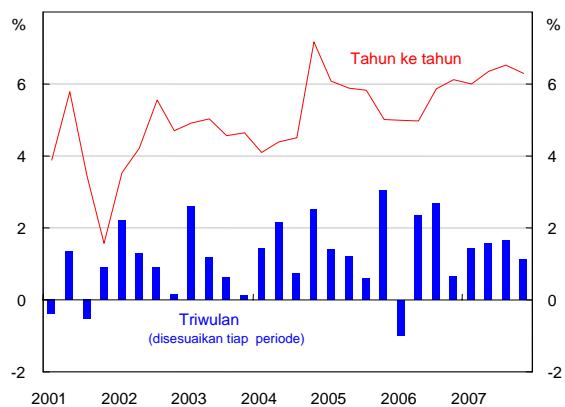
Asia Timur pasti terpengaruh oleh perkembangan global, namun kawasan ini berada dalam posisi cukup baik untuk melewati krisis ini tanpa menyebabkan kerusakan yang signifikan pada prospeknya. Secara umum, investasi yang dilakukan negara-negara di kawasan ini dalam kebijakan makroekonomi yang kuat dan reformasi struktural dalam dekade terakhir ini telah meningkatkan ketahanan dan fleksibilitas ekonomi yang akan membantu dalam menghadapi tantangan tersebut pada satu atau dua tahun ke depan. Namun tantangan masa depan tersebut tidak boleh diremehkan. Kejutan-

kejutan lainnya di pasar aset A.S tidak boleh diabaikan. Krisis keuangan pasti akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap pertumbuhan global, perdagangan, dan arus keuangan, walaupun besarnya akibat yang akan terjadi masih belum dapat dipastikan.

**2. Indonesia, seperti banyak negara Asia Timur lainnya, sejauh ini berhasil mempertahankan momentum pertumbuhannya meskipun terjadi penurunan secara global**

**Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen pada tahun 2007, pertumbuhan tercepat sejak terjadinya krisis ekonomi di akhir 1990-an.** Selama paruh pertama tahun 2007, perekonomian mengalami laju pertumbuhan yang sangat cepat, meskipun sedikit melambat di bulan-bulan akhir tahun 2007 (Gambar 1, Tabel 2). Kekuatan pada perekonomian dalam negeri mendominasi neraca nasional: konstruksi dan konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan agregat. Pertumbuhan ekspor tetap kuat, di mana beberapa bidang dari sektor manufaktur seperti produksi kendaraan menutupi kelemahan di bidang lainnya, terutama di sektor minyak dan gas. Indikator-indikator parsial menunjukkan laju pertumbuhan di triwulan pertama tahun 2008 masih sama dengan laju pertumbuhan di bulan Desember.

**Gambar 1: Pertumbuhan PDB yang kuat di 3 triwulan pertama tahun 2007 sedikit menurun di triwulan keempat (perubahan persentase)**



Sumber: BPS; data triwulan yang telah disesuaikan (Bank Dunia)

**Investasi tumbuh dengan pesat di paruh kedua tahun 2007**, yang meningkat hingga sebesar 12,1 persen sepanjang tahun tersebut, dan meningkatkan porsi investasi dalam belanja Indonesia menjadi 25 persen pada triwulan Desember tahun 2007 (Gambar 2). Peningkatan di bidang konstruksi, yang merupakan bentuk dari sebagian besar investasi, merupakan salah satu penyebab utama kenaikan tersebut, dan selain itu investasi dalam mesin & peralatan juga tumbuh pesat selama tahun tersebut. Investasi dalam mesin dan peralatan impor juga cukup besar. Data tentang kegiatan impor menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas produksi otomotif dan lonjakan permintaan dalam industri telekomunikasi merupakan rfaktor pendorong bagi sebagian besar investasi non-konstruksi, dan data impor serta jumlah persetujuan dan realisasi investasi asing menunjukkan laju pertumbuhan tersebut akan berlanjut dalam jangka waktu berikutnya. Sektor swasta tampaknya menjadi kekuatan pendorong karena belanja modal yang dikeluarkan pemerintah pusat hanya meningkat sebesar 6 persen pada tahun 2007 pada

**Tabel 2: Neraca Pengeluaran**

	2004	2005	2006	2007	2007				2007	
					T1	T2	T3	T4	%ptt kontribusi	Porsi dari GDP (%)
					Persentase Perubahan Disesuaikan					
	Persentase Perubahan Tahunan				Pertriwulan Pertahun					
<b>Total PDB</b>	<b>5.0</b>	<b>5.7</b>	<b>5.5</b>	<b>6.3</b>	<b>5.3</b>	<b>7.1</b>	<b>7.5</b>	<b>5.0</b>	<b>6.3</b>	<b>100</b>
<b>Domestik</b>	<b>7.0</b>	<b>5.8</b>	<b>3.5</b>	<b>6.0</b>	<b>3.5</b>	<b>8.5</b>	<b>8.2</b>	<b>7.0</b>	<b>5.2</b>	<b>97</b>
Konsumsi rumah	5.0	4.0	3.2	5.0	5.2	5.3	5.5	5.7	2.9	63
Konsumsi Pemerintah	4.0	6.6	9.6	3.9	-20.1	31.4	7.2	-4.8	0.3	8
Investasi	14.7	10.9	2.5	9.2	8.5	9.7	15.7	15.0	2.0	25
(Konstruksi)	7.5	7.5	8.3	8.6	8.0	8.6	10.7	12.4	1.4	21
<b>Luar Negeri</b>	<b>-19.5</b>	<b>12.0</b>	<b>12.8</b>	<b>4.5</b>	<b>-39.1</b>	<b>123.6</b>	<b>-17.2</b>	<b>-29.7</b>	<b>0.4</b>	<b>4</b>
Ekspor	13.5	16.6	9.4	8.0	12.2	9.1	1.2	10.0	3.8	29
Import	26.7	17.8	8.6	8.9	1.9	20.4	16.8	21.2	3.3	25

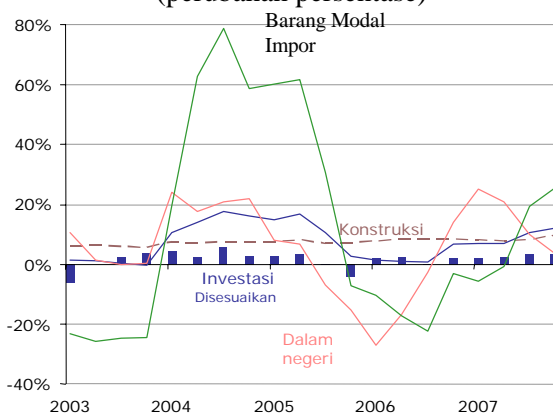
Catatan: Komponen tidak dijumlahkan karena tidak dimasukkannya perbedaan saham dan statistik.

Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia.

kenyataannya dan walau usulan anggaran perubahan untuk tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan belanja pemerintah tahun ini, hal tersebut belum tentu dapat diwujudkan akibat tekanan dari subsidi energi (Bagian 6)

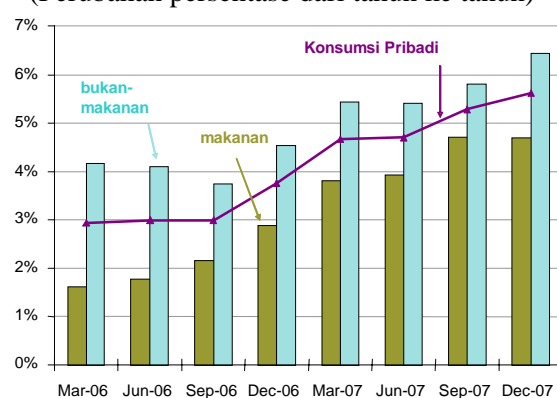
**Konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,0 persen antara tahun 2006 dan 2007 dan hanya 5.6 persen selama tahun 2007, yang merupakan laju pertumbuhan tercepatnya dalam dekade ini** (Gambar 3). Konsumsi dalam bidang non-makanan merupakan bidang terdepan dalam pertumbuhan tersebut. Laju pertumbuhan pada Triwulan Desember tampaknya sama dengan laju pertumbuhan pada awal tahun 2007 sesuai dengan laju pertumbuhan per triwulan yang disesuaikan dan indikator parsial lainnya. Sebagai contoh, kredit konsumen meningkat pada tahun 2007 seiring dengan merosotnya tingkat suku bunga, peningkatan pada penjualan kendaraan bermotor sangat pesat, walaupun penjualan sepeda motor semakin beragam akhir-akhir ini, dan tingkat pengangguran turun menjadi 9,1 persen pada tahun 2007 dari 10,3 persen pada tahun 2006. Sebaliknya, konsumsi negara meningkat hanya 2,0 persen dari akhir tahun 2006 dan hanya 3,9 persen secara tahunan, dan tampaknya akan semakin merosot pada tahun 2008 mengingat adanya masalah yang dihadapi untuk melanjutkan pembiayaan untuk subsidi energi yang semakin meningkat.

**Gambar 2. Investasi meningkat, dengan mengandalkan barang modal impor (perubahan persentase)**



Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 3. Konsumsi rumah tangga yang besar (Perubahan persentase dari tahun ke tahun)**



Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Pertumbuhan ekspor yang kuat dibayangi oleh peningkatan impor yang jauh lebih kuat, dan ekspor bersih menjadi negatif di paruh kedua tahun 2007.** Jumlah total ekspor meningkat sebesar 8,0 persen pada tahun 2007 dari tahun 2006, dan 7,3 persen pada tahun tersebut sampai triwulan Desember, yang didominasi oleh ekspor manufaktur, terutama barang otomotif dan zat kimia, dan oleh beberapa produk pertanian. Volume ekspor produk pertambangan dan kehutanan merosot selama tahun 2007 yang disebabkan oleh masalah pasokan dalam kedua industri tersebut. Peningkatan impor sebesar 14,8 persen pada tahun 2007 terjadi dengan basis yang luas. Peningkatan sebesar 24 persen pada impor barang modal menunjukkan kekuatan investasi, seperti juga berbagai barang penunjang seperti baja. Tingginya permintaan konsumen mengakibatkan terjadinya lonjakan impor bahan pangan termasuk beras dan gula, dan impor mobil penumpang mengalami peningkatan sebesar 69 persen.

**Kekuatan perekonomian dalam negeri Indonesia, khususnya permintaan konsumen, juga tampak dalam neraca produksi.** Industri-industri yang bersifat dapat diperdagangkan (*tradable*) terus menunjukkan pertumbuhan yang lemah pada tahun 2007, sedangkan sektor-sektor yang terfokus pada pasar dalam negeri menunjukkan pertumbuhan yang kuat – sektor industri yang bersifat tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) tumbuh sebesar 10 persen dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2007, semua sektor produksi mencatat pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2006 (Tabel 3).

**Tabel 3: Neraca Produksi**

Neraca Produksi - PDB	Dari Tahun ke Tahun (%)				Porsi Pada Perubahan %			
	2007				2006	2007	2006	2007
	T1	T2	T3	T4				
<b>Dapat diperdagangkan</b>	<b>3,4</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>35,1</b>	<b>31,3</b>
Pertanian	-1,7	4,7	7,6	3,1	3,4	3,5	8,8	7,9
Pertambangan	6,2	3,2	1,0	-2,1	1,7	2,0	2,9	2,9
Manufakturing	5,2	5,1	4,5	3,8	4,6	4,7	23,4	20,5
<b>Tidak Dapat Diperdagangkan</b>	<b>9,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>10,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,9</b>	<b>64,9</b>	<b>68,7</b>
Konstruksi	8,4	7,7	8,3	9,9	8,3	8,6	9,0	8,3
Keuangan	8,1	7,6	7,6	8,6	5,5	8,0	9,1	11,6
Transportasi & Komunikasi	13,0	12,7	14,1	17,4	14,4	14,4	16,3	15,4
Layanan	8,2	10,2	11,3	11,8	5,8	10,4	0,7	1,1
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9,2	7,6	7,9	9,1	6,4	8,5	19,6	22,6
Jasa	7,0	7,0	5,2	7,2	6,2	6,6	10,3	9,7
<b>Total</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>6,3</b>	100	100
Minyak	-0,7	-1,7	1,3	-2,2	-1,3	-0,8	-1,9	-1,0
Non-Minyak	6,7	7,1	6,9	7,0	6,1	6,9	101,9	101,0
<b>Total</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>5,5</b>	<b>6,3</b>	100	100

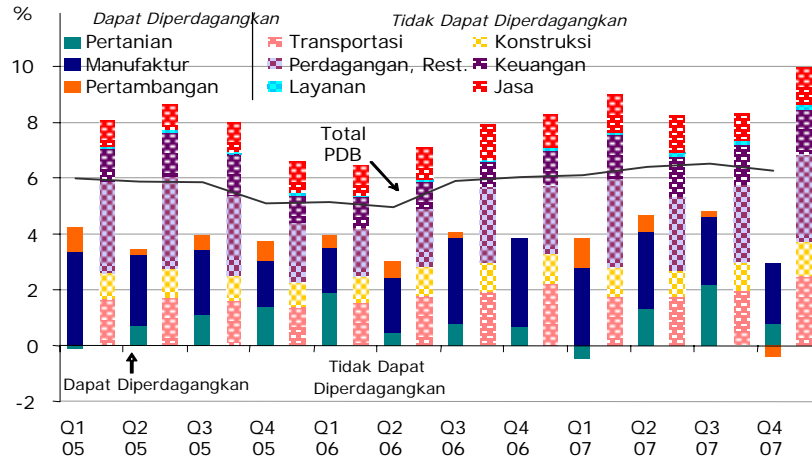
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia

**Gambaran buruk sektor yang dapat diperdagangkan (*tradable*) ini sedikit menyedihkan.** Sebagian besar kelemahan pada produk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) disebabkan oleh kinerja buruk sektor minyak dan gas (yang mengurangi 0,3 angka persentase dari pertumbuhan sektor yang dapat diperdagangkan (*tradable*) dan sektor pertanian, yang menghasilkan seperempat dari hasil sektor industri yang dapat diperdagangkan (*tradable*), dan yang, sebagaimana terjadi di negara-negara lain, tumbuh dengan laju yang lebih rendah daripada sektor ekonomi lainnya. Sektor manufaktur non-

migas mencatat kinerja yang beragam pada tahun 2007. Produksi peralatan transportasi, mesin, & peralatan meningkat 14,5 persen dan kini menjadi hampir sepertiga barang hasil produksi sektor manufaktur Indonesia. Di sisi lain, produksi tekstil, pakaian & alas kaki serta produk hutan merosot sepanjang tahun 2007.

**Gambar 4. Industri yang produknya tidak dapat diperdagangkan (*non-tradables*) mendorong pertumbuhan Indonesia**

Perubahan persentase dari tahun ke tahun dan kontribusi angka persentase



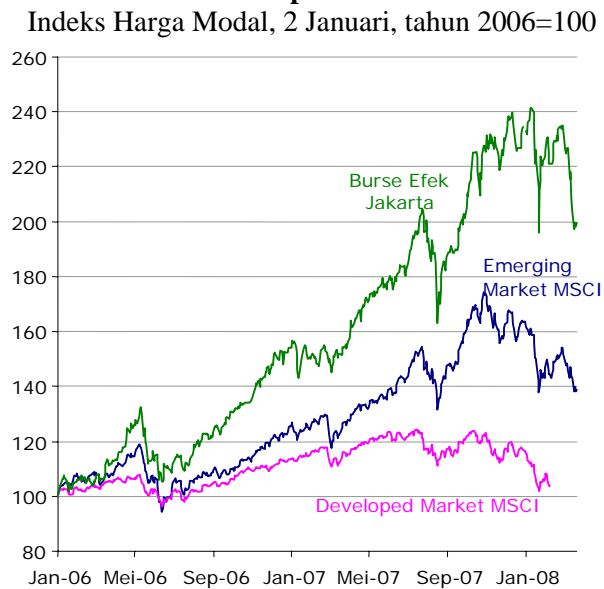
**Sektor industri yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) mencatat pertumbuhan yang pesat pada tahun 2007.** Peningkatan pada sebagian besar industri yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) didukung oleh impor-impor barang terkait. Sebagai contoh, peningkatan dalam produksi transportasi dan komunikasi, yang lebih tinggi 17,4 persen jika dibandingkan dengan keadaan di akhir tahun 2006, mengakibatkan impor peralatan telekomunikasi dan pesawat udara yang jauh lebih banyak. Sementara permintaan konsumen mengakibatkan pertumbuhan yang pesat dalam perdagangan grosir & eceran serta hotel & restoran, di mana masing-masing mencatat pertumbuhan sebesar 9,5 persen dan 7,5 persen pada tahun 2007. Peningkatan jumlah pelancong yang baru-baru ini terjadi dan kampanye pariwisata Visit Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya mendukung sektor-sektor tersebut pada tahun ini. Industri jasa keuangan & bisnis tumbuh sebesar 8,6 persen, di mana jasa konstruksi merupakan sektor terdepan.

**3. Gejolak keuangan global mulai terasa dampaknya, namun nampaknya fondasi sektor keuangan Indonesia tetap kuat**

***Pasar Modal dan Lembaga Keuangan non-bank***

Pasar saham Indonesia merupakan salah satu yang memiliki kinerja terbaik di dunia pada tahun 2007, sebagaimana yang telah terjadi sejak tahun 2003, namun mengalami sedikit penurunan akhir-akhir ini seiring dengan terjadinya gejolak di pasar keuangan global (Gambar 5). IHSG di Jakarta meningkat sebesar 52 persen dan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2007. Perusahaan perkebunan, pertambangan, dan sumber daya alam lainnya mendorong pencapaian kinerja tersebut. Saham bank meningkat sejalan dengan ekspektasi adanya pertumbuhan baru di bidang pinjaman konsumen yang memberikan hasil tinggi. Namun, seperti pasar saham lainnya di dunia, sejak awal tahun 2008 pasar saham Indonesia telah mengalami koreksi yang signifikan, dengan penurunan sebesar 9,3 persen antara awal tahun hingga akhir Maret 2008, namun masih mencatat kinerja yang lebih baik dibandingkan mayoritas pasar saham di kawasan tersebut.

**Gambar 5. Pasar modal Indonesia berkinerja sangat baik pada tahun 2007, namun lebih liar dan lemah pada tahun ini**



Sumber: Bloomberg

**Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya telah digabungkan menjadi Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2007.** Proses merger berlangsung lancar dan tidak mengganggu perdagangan. Bursa Efek yang baru mendapatkan keuntungan dari kekuatan Bursa Efek Jakarta dalam pasar modal sekunder dan peran dominan Bursa Efek Surabaya dalam pasar obligasi sekunder.

**Dana yang terkumpul di pasar modal domestik meningkat tajam pada tahun 2007.** Lebih dari Rp. 45 Triliun terkumpul di pasar modal melalui penawaran saham perdana (17,2 Triliun) dan emisi saham (27,9 Triliun), dibandingkan dengan Rp. 12,9 Triliun pada tahun 2006. Di pasar obligasi korporasi, utang baru sebesar Rp. 31,3 Triliun telah diterbitkan pada tahun 2007 bandingkan dengan Rp. 19,6 Triliun pada tahun 2006. Sebagian besar dari utang tersebut dikeluarkan oleh lembaga keuangan negara. Pemerintah juga telah melelang seri baru Surat Utang Negara ke pasar yang relatif masih baru, dengan permintaan yang semakin meningkat dari investor eceran yang tertarik dengan keuntungan yang relatif besar. Suku bunga rata-rata deposito saat ini adalah 7,4 persen per tahun, sedangkan surat utang negara yang diterbitkan pada bulan Februari 2008 menawarkan bunga sebesar 9,5 persen dengan waktu jatuh tempo 4 tahun. Setelah bank, investor asing menjadi pemegang surat utang negara terbesar, diikuti oleh reksadana (Tabel 4).

**Tabel 4: Pemilik Surat Utang Negara**  
(Triliun Rupiah)

	2006	Desember 2007
<b>Pemilik</b>		
SOB Rekap	269,11	154,67
Bank Swasta Rekap	152,76	72,63
Bank Non-Rekap	32,78	35,37
BPD	2,78	5,97
Bank Indonesia	7,54	14,86
<b>Bukan Bank</b>	<b>142,09</b>	<b>194,24</b>
Reksadana	21,43	26,33
Asuransi	35,04	43,47
Orang Asing	54,92	78,16
Dana Pensiun	23,08	25,50
Perusahaan Sekuritas	1,00	0,28
<b>TOTAL</b>	<b>418,75</b>	<b>477,75</b>

Sumber: Kantor Pengelolaan Utang Indonesia, Departemen Keuangan

**Nilai Aktiva Bersih (Net Asset Value atau NAV) reksadana meningkat cukup tinggi pada tahun 2007 ketika produk-produk baru memasuki pasar.** Nilai Aktiva Bersih reksadana meningkat 78,6 persen pada tahun 2007, menjadi Rp. 92,2 triliun. Sentimen peningkatan nilai pasar di pasar modal membuat lebih banyak investor reksadana melirik reksadana pasar modal. Reksadana tersebut saat ini merupakan bagian terbesar dari total Nilai Aktiva Bersih (36,4 persen), diikuti dengan reksadana pendapatan tetap (24,4 persen), dana terlindungi modal (18,4 persen), dana berimbang (15,3 persen), dana pasar uang (5,3 persen), sedangkan reksadana indeks dan Reksadana yang Diperdagangkan di Bursa Efek (ETF) masing-masing hanya sebesar kurang dari 1 persen dari total Nilai Aktiva Bersih.

**Pasar asuransi jiwa meningkat pesat.** Menurut asosiasi perusahaan asuransi jiwa, premi yang terkumpul pada tahun 2007 meningkat setidaknya 40 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 22 persen pada tahun 2006. Jumlah premi telah meningkat lebih dari 20 persen pertahun selama tiga tahun terakhir didukung oleh tingginya permintaan untuk produk asuransi yang terkait dengan investasi. Pertumbuhan di asuransi umum jauh lebih rendah dan persaingan lebih keras karena basis konsumen yang lebih kecil.

### **Sektor Perbankan**

**Rasio keuangan menunjukkan bahwa bank-bank masih tetap sehat.** Pada tahun 2007, rasio-rasio keuangan utama menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Rasio-rasio keuntungan seperti margin bunga bersih, laba atas aktiva, dan laba atas modal masih tetap kuat. Rasio aktiva terhadap modal telah berkurang dan rasio pinjaman terhadap simpanan telah meningkat secara bertahap, yang mengindikasikan peningkatan peran perbankan sebagai penengah keuangan. Kredit macet (*Non performing loans* atau NPL) membaik secara signifikan pada tahun 2007, meneruskan penurunan dari puncaknya yang tercapai pada tahun 2005. Pengurangan NPL secara substansial di bank milik negara merupakan pendorong utama keberhasilan tersebut. Secara umum, kinerja

keuangan bank milik negara telah meningkat sepanjang tahun 2007. Namun demikian, dalam hal rasio NPL dan efisiensi operasional bank milik negara tidak memiliki kinerja sebaik bank-bank swasta. (Tabel 5).

<b>Tabel 5: Rasio Keuangan Bank Umum</b>						
	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
CAR	22,4%	19,4%	19,4%	19,3%	21,3%	19,3%
<i>dari bank milik negara</i>	21,7%	18,2%	20,7%	19,4%	21,2%	17,9%
NIM	4,1%	4,6%	5,9%	5,6%	5,8%	5,7%
<i>dari bank milik negara</i>	3,8%	4,5%	6,2%	5,8%	5,8%	6,0%
NPL (Bruto)	7,5%	6,8%	4,5%	7,6%	6,1%	4,1%
<i>dari bank milik negara</i>	6,0%	7,3%	5,9%	14,8%	10,7%	6,5%
ROA	2,0%	2,6%	3,5%	2,6%	2,6%	2,8%
<i>dari bank milik negara</i>	2,0%	2,7%	3,5%	2,5%	2,2%	2,8%
ROE	15,0%	21,4%	23,0%	18,0%	17,1%	18,0%
<i>dari bank milik negara</i>	22,1%	22,7%	23,2%	17,4%	16,0%	18,6%
<i>Op.Ex/Op.Inc</i>	94,8%	88,1%	76,6%	89,5%	87,0%	84,1%
<i>dari bank milik negara</i>	98,5%	92,1%	75,7%	95,2%	97,1%	90,7%
LDR	38,2%	43,5%	50,0%	59,7%	61,6%	66,3%
<i>dari bank milik negara</i>	34,5%	41,6%	49,9%	51,0%	59,9%	62,4%

Sumber: Bank Indonesia

**Jumlah total pinjaman bank meningkat, dengan pinjaman konsumen kembali tumbuh pesat.** Total pinjaman yang masih terutang di sektor perbankan meningkat 27 persen tahun lalu dibandingkan dengan hanya 14 persen pada tahun sebelumnya. Pinjaman konsumen kembali tumbuh sebesar 25 persen pada tahun 2007 setelah mengalami peningkatan hanya sebesar 11 persen pada tahun 2006 (Tabel 6). Pinjaman tersebut – umumnya terdiri atas hipotik, otomotif (mobil dan motor), kartu kredit, dan kredit multiguna tanpa agunan – nampaknya menanggapi dengan cepat penurunan tingkat suku bunga di pasar. Sebuah pertanda yang membangkitkan semangat adalah bahwa pinjaman investasi meningkat 23 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 13 persen, sejalan dengan tren peningkatan investasi dalam perekonomian nasional.

**Pinjaman properti terus berkembang dengan pesat.** Lokasi proyek konstruksi untuk gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan dapat ditemui dengan sangat mudah di Jakarta beberapa tahun terakhir. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan

riset properti, Jones Lang Lasalle<sup>1</sup> menunjukkan bahwa permintaan tinggi untuk gedung perkantoran yang dapat dijadikan investasi telah menimbulkan pertumbuhan nilai sewa sebesar 34,8 persen. Akan tetapi, peningkatan suplai diperkirakan akan melebihi permintaan baru, dan tingkat kekosongan diperkirakan akan meningkat dari 21 menjadi 25 persen dalam tiga tahun ke depan. Kinerja pengecer kelas atas tidak sebaik itu, dengan pertumbuhan inventaris yang cepat pada tahun-tahun terakhir. Tahun lalu, nilai sewa untuk lokasi pertokoan utama tumbuh hanya 1,3 persen, dan dalam dua tahun sebelumnya masing-masing 13 persen dan 6 persen.

**Tabel 6. Pertumbuhan Semua Bank Umum:**  
(perubahan persentase dari tahun ke tahun)

	2003	2004	2005	2006	2007
Modal Kerja	13,0%	24,1%	22,4%	17,0%	28,6%
Investasi	13,5%	24,0%	13,2%	12,5%	23,2%
Konsumsi	41,5%	37,4%	38,4%	10,5%	24,8%
<i>Properti*</i>	92,0%	35,6%	43,2%	35,1%	31,5%
<b>Total Pinjaman</b>	<b>18,7%</b>	<b>26,9%</b>	<b>24,4%</b>	<b>13,9%</b>	<b>26,5%</b>

\* Pinjaman modal kerja, investasi, dan konsumsi

Sumber: Bank Indonesia

**Sektor perbankan masih sangat likuid.** Bank masih menguasai aset likuid dalam jumlah besar dalam neraca mereka. Penempatan pada Bank Indonesia, termasuk SBI, berjumlah total Rp. 418 triliun atau 34 persen dari aset bank pada tahun 2007, dengan Rp. 108 triliun atau 9 persen dari aset diinvestasikan dalam surat berharga yang dapat dipasarkan (kebanyakan surat utang negara).

**Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir telah mengambil beberapa langkah untuk mendorong penyaluran pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).** Bank Indonesia telah mengumumkan peraturan untuk (i) memberikan perlakuan istimewa untuk pinjaman kepada UMKM terkait dengan peraturan kehati-hatian; (ii) mendorong bank untuk menyediakan dukungan pengembangan usaha; (iii) mewajibkan bank untuk mencapai rasio pinjaman UMKM tertentu dalam keseluruhan portepel pinjaman dan (iv) memberikan tingkat risiko yang lebih rendah untuk pinjaman UMKM yang dijamin oleh perusahaan penjamin kredit. Akan tetapi, BI menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut akan diambil dengan mempertimbangkan portepel pinjaman tiap bank.

**Larangan BI mengenai kepemilikan silang bank memicu gelombang merger dan divestasi.** Pemilik Bank Niaga dan Bank Lippo, perusahaan investasi negara asal Malaysia Khazanah Nasional Bhd, berencana untuk melakukan merger atas kedua perusahaan tersebut untuk mematuhi peraturan BI yang membatasi kepemilikan hanya pada satu bank (*Single Presence Policy*). Bank yang akan digabung tersebut akan menjadi bank terbesar kelima di negara ini jika dihitung dari jumlah total aset. Temasek Holding asal Singapura juga menanggapi peraturan tersebut dengan menjual Bank Internasional Indonesia (BII) kepada Malayan Bank Bhd (MayBank) seharga \$1.5 milyar dolar AS; Temasek akan mempertahankan kepemilikannya atas Bank Danamon.

<sup>1</sup> Jones Lang Lasalle, "Asia Pacific Property Digest" Triwulan ke-4 tahun 2007

**4. Tingginya harga komoditas telah membantu ekspor Indonesia, yang sedang mendiversifikasi tujuan dan komposisi ekspornya**

**Harga komoditas yang terus meningkat mendorong pertumbuhan ekspor, dan mendukung perekonomian Indonesia.** Nilai total ekspor mencapai \$114 milyar pada tahun 2007 (Tabel 7) dan didorong terutama oleh ekspor non-migas. Harga yang tinggi telah membantu pertumbuhan ekspor non-migas yang mencapai 15,5 persen pada tahun 2007, dengan 63 persen dari pertumbuhan itu ditopang oleh sektor pertanian dan pertambangan.

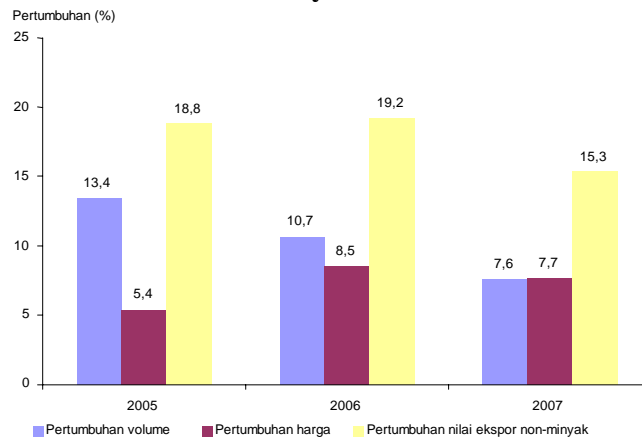
**Tabel 7. Perdagangan Luar Negeri Indonesia**

Keterangan	Januari - Desember						
	Dalam Milyar USD			Tahun ke tahun (%)		Bagian pada pertumbuhan total (%)	
	2005	2006	2007	2006	2007	2006	2007
<b>Total Ekspor</b>	<b>85,7</b>	<b>100,8</b>	<b>114,0</b>	<b>17,7</b>	<b>13,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Non Migas	66,4	79,6	91,9	19,8	15,5	86,93	93,41
Migas	19,2	21,2	22,1	10,3	4,1	13,07	6,59
<b>Total Impor</b>	<b>57,7</b>	<b>61,1</b>	<b>74,4</b>	<b>5,8</b>	<b>21,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Non Migas	40,2	42,1	52,5	4,6	24,8	55,26	78,02
Migas	17,5	19,0	21,9	8,6	15,5	44,74	21,98

Sumber: BPS.

Pada tahun 2007 kenaikan harga merupakan salah satu dari dua faktor pendukung pertumbuhan dalam ekspor non-migas (Gambar 6). Harga minyak sawit yang tinggi telah mendorong ekspor hingga naik sebesar 55 persen pada tahun 2007, dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 16 persen pada tahun 2006. Harga minyak yang tertinggi dalam sejarah tidak mengakibatkan peningkatan besar dalam ekspor minyak/gas – sementara impor minyak/gas melonjak naik sebesar 15 persen; ekspor minyak/gas hanya meningkat 4,2 persen. Di sisi impor, harga komoditas tinggi memainkan peran yang signifikan terhadap peningkatan impor

**Gambar 6. Efek harga merupakan factor pendukung untuk separuh dari pertumbuhan ekspor non-minyak di 2007**



Catatan: 2005: data Januari-Desember; tahun 2006 dan tahun 2007: data Januari-November.

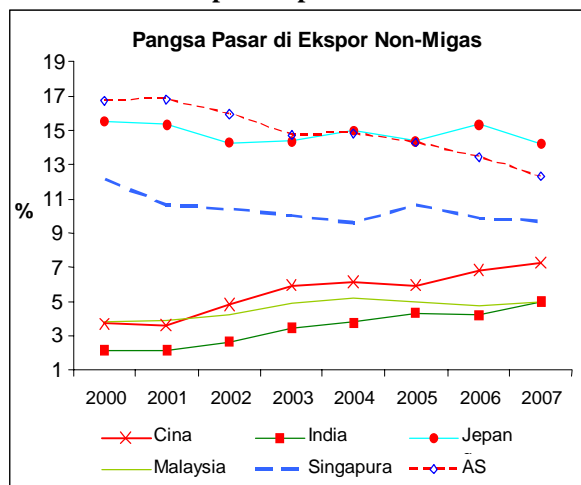
Sumber: BPS, perhitungan staf Bank Dunia.

barang menengah, terutama kacang kedelai dan gandum. Meskipun demikian, Indonesia terus mengalami surplus dalam neraca perdagangan barangnya sebesar \$39,6 Milyar AS.

**Peralatan transportasi mungkin akan segera menjadi pendorong ekspor barang manufaktur Indonesia.** Ekspor barang manufaktur tumbuh sebesar 11,4 persen pada tahun 2007, sedikit di atas pertumbuhan pada tahun 2006 yang mencapai 10 persen, dan menyumbangkan 4,4 angka persentase pada pertumbuhan ekspor secara keseluruhan. Dengan adanya pertumbuhan yang pesat pada nilai tambah dalam proses manufakturnya, industri peralatan transportasi tampaknya telah menemukan sebuah pasar internasional dengan ekspor yang tumbuh sebesar 37 persen pada tahun 2007, menyumbangkan 5,7 persen dari pertumbuhan ekspor non-migas. Kendaraan penumpang, suku cadang dan komponen otomotif, serta kendaraan laut mencatat peningkatan ekspor tertinggi. Sebaliknya, pertumbuhan di ekspor manufaktur tradisional yakni tekstil, pakaian, dan sepatu (*Textiles, clothing, and footwear* atau TFC) menurun menjadi hanya 4 persen pada tahun 2007 setelah mengalami pertumbuhan sebesar 11 persen pada tahun 2006, yang mencerminkan semakin sengitnya persaingan dari Cina dan Vietnam.

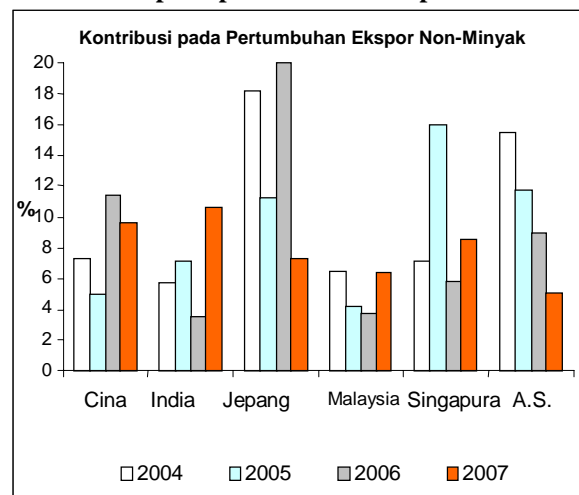
**Ekspor non-migas Indonesia telah mengurangi ketergantungan pada AS, karena fokusnya telah bergeser ke Cina, Malaysia dan India** (Gambar 7 dan Gambar 8). Meskipun Amerika Serikat masih menjadi pasar ekspor terpenting kedua bagi Indonesia, kontribusinya terus menurun. Ekspor non-migas ke AS mencapai angka \$11,3 milyar AS tahun 2007, namun kontribusinya pada jumlah total ekspor non-migas Indonesia turun menjadi 12 persen pada tahun 2007 dari 17 persen pada tahun 2000. Ekspor ke Cina, Malaysia, dan India tumbuh pesat. Ekspor non-migas ke Cina, Malaysia, dan India masing-masing meningkat sebesar 22 persen, 48 persen, dan 21 persen pada tahun 2007. Pasar-pasar tersebut menyumbang 27 persen dari peningkatan ekspor non-migas Indonesia. Pertumbuhan permintaan yang kuat dan harga komoditas pertanian dan pertambangan yang tinggi turut menyumbang pada pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara tersebut.

**Gambar 7. Ekspor berpindah dari AS ke Asia**



Sumber: BPS dan UN-Comtrade

**Gambar 8. Cina, India, dan Malaysia berperan lebih besar pada pertumbuhan ekspor Indonesia**

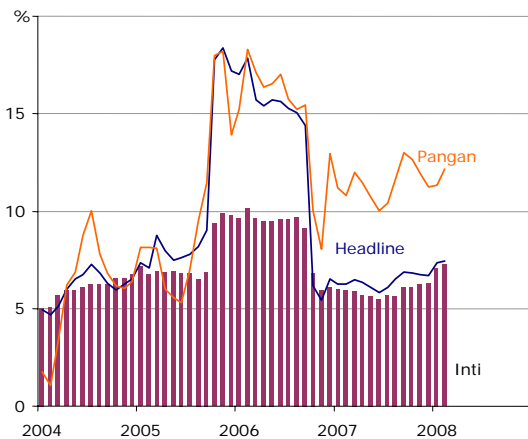


Sumber: BPS, data UN-Comtrade, perkiraan staf Bank Dunia

### 5. Peningkatan harga komoditas pertanian (pangan) mengakibatkan peningkatan inflasi dalam negeri

**Inflasi terus meningkat di Indonesia sejak paruh kedua tahun 2007.** Inflasi menunjukkan peningkatan sebesar 7,4 % (dari tahun ke tahun) pada Februari 2008, setelah terjadi peningkatan yang berarti pada bulan Desember 2007 dan Januari 2008. Inflasi inti juga terus bergerak naik pada beberapa bulan belakangan ini, hingga mencapai 7,3 persen pada Februari pada tahun 2007 (Gambar 9).

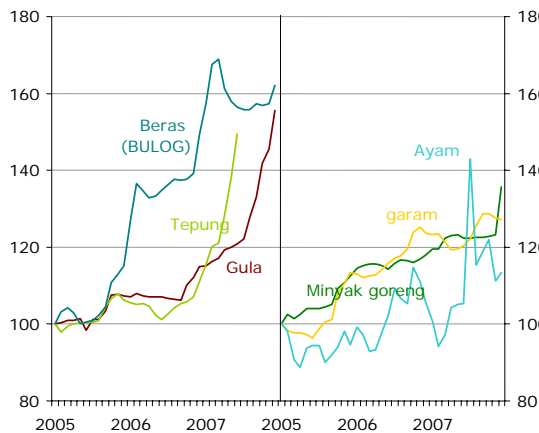
**Gambar 9. Inflasi pangan telah melampaui jumlah Indeks Harga Konsumen**  
(Perubahan persentase dari tahun ke tahun)



Sumber: BPS dan Perhitungan Staf Bank Dunia

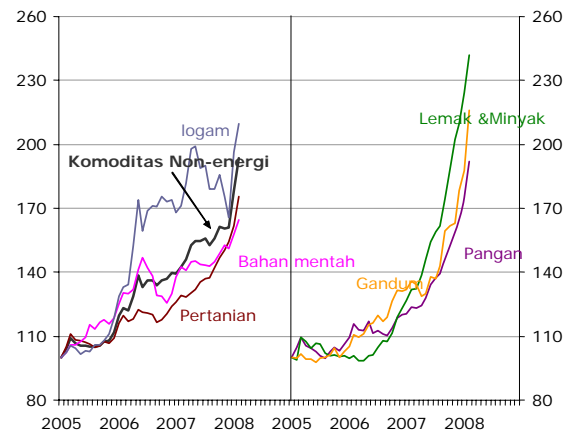
**Harga pangan merupakan faktor pendukung terbesar untuk peningkatan biaya hidup yang terjadi baru-baru ini,** yang meningkat sebesar 10, 4 persen dari tahun ke tahun. Saat ini, harga yang terkait dengan pangan besarnya hampir separuh dari Indeks Harga Konsumen, dan bahkan bagian yang lebih besar dari kelompok barang konsumsi rumah tangga miskin. Sebagian besar dari inflasi tersebut mencerminkan pertumbuhan harga pangan internasional: Harga gula eceran meningkat sebesar 35 persen sepanjang tahun 2007 dan harga minyak goreng meningkat 15 persen, keduanya mengikuti peningkatan harga internasional karena penggunaannya telah beralih untuk keperluan bahan bakar biologis (*biofuels*). (Gambar 10 dan Gambar 11) Harga terigu juga meningkat tajam. Harga untuk semua sumber protein, kecuali ikan, mengalami peningkatan sebesar dua digit selama tahun 2007.

**Gambar 10. Harga beras stabil pada tahun 2007, namun harga pangan lainnya meningkat tajam**  
Indeks, Januari 2005=100



Sumber: CEIC, Perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 11. Sebagian besar harga komoditas meningkat tajam, terutama bahan makanan pokok**  
Indeks, Januari 2005=100



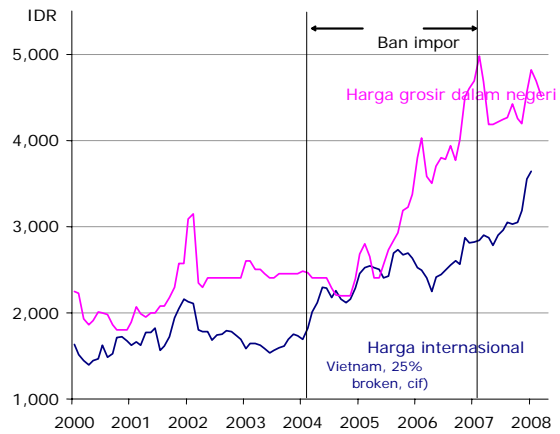
Sumber: CEIC, Perhitungan staf Bank Dunia

Sebagai salah satu hal yang penting, peningkatan harga beras dalam negeri relatif rendah, yaitu sebesar 8,7 persen sampai bulan Desember 2007. Harga beras di Indonesia telah meningkat pesat pada tahun 2006 karena larangan impor mengakibatkan terbatasnya persediaan; dengan dicabutnya larangan tersebut, harga beras dalam negeri menjadi stabil, namun harga internasional saat ini meningkat dengan pesat hingga mencapai tingkat paritas (Gambar12).

**Komponen lain dari Indeks Harga Konsumen juga menunjukkan perkembangan yang pesat:** Harga sandang meningkat sebesar 11.4 persen sampai bulan Februari pada tahun 2007, sedangkan harga pendidikan, rekreasi, dan olahraga meningkat sebesar 8,5 persen, dengan penurunan harga yang sebelumnya telah terjadi pada tahun 2007.

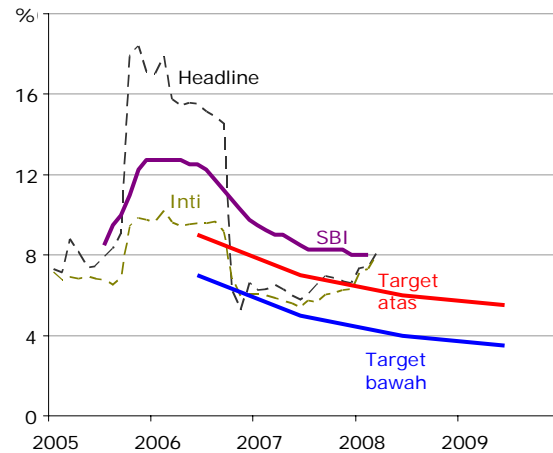
**Tingkat inflasi saat ini semakin tidak sesuai dengan target inflasi Bank Indonesia** (Gambar 13). Sampai sekarang Bank Sentral telah memberikan reaksi dengan mempertahankan kebijakan tingkat inflasi 8,0 persen setelah spekulasi di akhir tahun 2007 tentang kemungkinan potongan bunga selanjutnya. Peningkatan nilai tukar telah mengurangi tekanan inflasi, namun di lain pihak, kredit komersial dan khususnya kredit konsumsi telah meningkat pesat dalam beberapa bulan belakangan ini, sebesar 26,5 persen pada tahun 2007 (lihat bab3).

**Gambar 12. Perbedaan antara harga beras dalam negeri dan internasional semakin mengecil**



Sumber. CEIC

**Gambar 13. Inflasi lebih tinggi dari tingkat yang ditargetkan Bank Indonesia (Persentase PDB)**



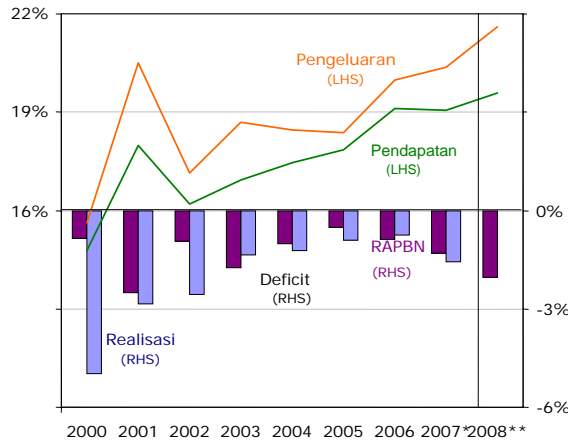
Sumber. BPS, perhitungan staf Bank Dunia dan Bank Indonesia

**6. Peningkatan harga energi menimbulkan keprihatinan tentang kondisi APBN dan memaksa dilakukannya perubahan**

Membengkaknya subsidi energi merupakan perkembangan keuangan yang paling signifikan pada tahun 2008, yang menekan pengeluaran pemerintah lainnya dan target defisit anggaran Pemerintah sebesar 1,7 persen dari PDB. Proyeksi defisit

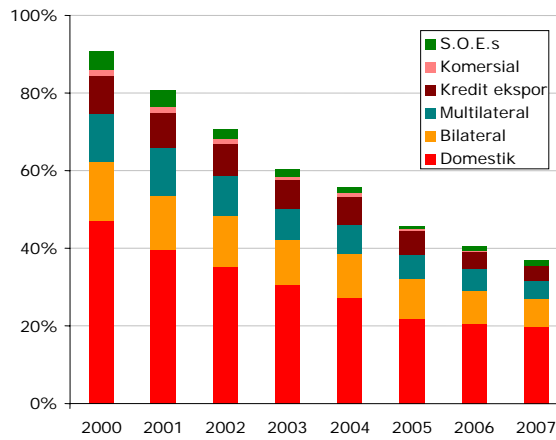
tahun ini diusulkan sebesar 2,1 persen dibandingkan dengan defisit yang lebih rendah dari yang diperkirakan untuk tahun 2007 yaitu sebesar 1,3 persen dari PDB, dan konsolidasi keuangan tahun 2005 dan 2006 (masing-masing defisit sebesar 0,5 persen dan 0,9 persen dari PDB) (Gambar 14).<sup>2</sup> Kendati terdapat peningkatan defisit pada tahun 2007, utang pemerintah terus menurun dengan cepat hingga mencapai 34,4 persen dari PDB (Gambar 15).

**Gambar 14. Belanja, pendapatan, dan saldo anggaran Pemerintah Pusat (Persen PDB)**



Sumber. Departemen Keuangan dan Perhitungan Staf Bank Dunia

**Gambar 15. Penurunan utang Pemerintah Pusat (Persen PDB)**



Sumber. Bank Indonesia dan Perhitungan staf Bank Dunia

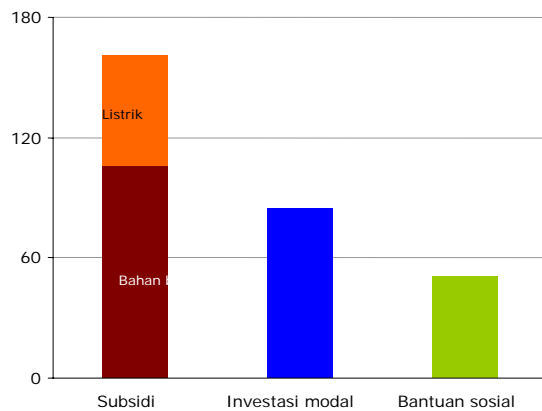
**Upaya untuk mengelola subsidi energi, membatasi peningkatan defisit anggaran, dan sumber penghasilan minyak dan gas bumi merupakan fokus dari anggaran perbaikan tahun 2008.** Pemerintah dan DPR masih melakukan negosiasi tentang anggaran perbaikan yang diajukan pemerintah. Unsur-unsur yang paling penting antara lain adalah asumsi-asumsi tentang harga dan produksi minyak, dan langkah-langkah untuk membatasi peningkatan subsidi energi baik yang berkenaan dengan volume produk energi bersubsidi yang dikonsumsi (minyak tanah, bensin, solar, gas elpiji, dan listrik. Anggaran perbaikan yang terdapat dalam Tabel 8 memperkirakan harga minyak rata-rata sebesar 83 US\$/ barel pada tahun 2008, produksi minyak sebanyak 910,000 barel per hari, dan 35.5 juta kiloliter bahan bakar subsidi yang dikonsumsi sepanjang tahun, tanpa perubahan harga bahan bakar yang diatur (minyak tanah, bensin premium dan solar.<sup>3</sup> Perubahan anggaran yang diajukan menunjukkan bahwa subsidi energi melampaui program pengeluaran sosial dan modal Pemerintah Pusat (Gambar 16). Selain itu, faktanya adalah subsidi-subsidi tersebut merupakan transfer kepada rumah tangga yang berkecukupan di Indonesia di mana 45 persennya diterima oleh rumah tangga berpenghasilan tinggi yang jumlahnya hanya 10 persen, (Susensas 2007) (Gambar 17). Untuk membatasi peningkatan subsidi dan menutup defisit anggaran dengan kisaran sebesar 2 persen, Pemerintah telah mengusulkan untuk:

<sup>2</sup> Jumlah realisasi anggaran berikut adalah permulaan.

<sup>3</sup> Harga Minyak Internasional kemudian meningkat hingga 95 US\$ dan kuantitas subsidi sedikit meningkat.

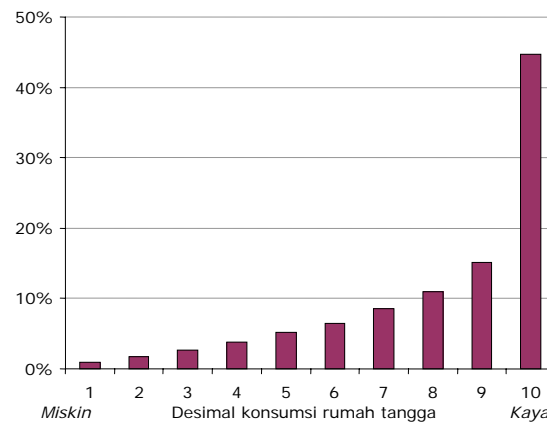
- a) Mengurangi pengeluaran Pemerintah sebesar 10-15 persen, untuk mengamankan program-program tunjangan sosial dan investasi modal;
- b) Meningkatkan pendapatan minyak dan gas bumi dengan mengurangi klaim yang berlebihan untuk pengembalian biaya;
- c) Mengurangi margin yang dibayarkan kepada perusahaan minyak negara, Pertamina, yang meliputi biaya transportasi, distribusi, dan penjualan produk yang disubsidi;
- d) Menerapkan insentif/disinsentif pada tarif listrik, di mana konsumen yang menggunakan listrik di bawah rata-rata kwh per golongan mendapatkan potongan sedangkan konsumen yang menggunakan listrik di atas rata-rata mendapatkan denda, sehingga meningkatkan pendapatan dan mendorong penghematan;
- e) Mempercepat peralihan dari minyak tanah bersubsidi tinggi ke elpiji yang sumsidinya lebih rendah;
- f) Membatasi pembelian minyak tanah bersubsidi hanya untuk rumah tangga miskin yang pantas mendapatkan subsidi beras; dan,
- g) Mungkin menerapkan sistem penjatahan untuk konsumsi bensin premium dan solar, dengan menggunakan sistem yang diatur oleh teknologi kartu pintar.

**Gambar 16. Proyeksi subsidi energi untuk tahun 2008 membuat program pengeluaran pemerintah lainnya tampak lebih kecil (Triliun Rupiah)**



Sumber: Menteri Keuangan, 2008 RAPBN-P. Perkiraan Minyak sebesar 95 US\$.

**Gambar 17. Sebagian besar dari subsidi bahan bakar diterima oleh rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi (Persentase subsidi bahan bakar diserap oleh rumah tangga)**



Sumber: Perhitungan Bank Dunia dari Susenas tahun 2007

**Anggaran perbaikan tersebut masih menyediakan ruang untuk ekspansi besar-besaran pada program kerja modal Pemerintah.**(Tabel 8). Pengeluaran modal yang diproyeksikan masih 15 persen lebih besar (bagian dari batas PDB) dari angka realisasi pada tahun 2007 dan pengeluaran modal tahun 2007 yang telah direalisasikan berkisar 8 persen lebih tinggi dari angka pada tahun 2006 (bagian dari PDB). Jika Pemerintah merealisasikan peningkatan dalam pengeluaran modal yang pada awalnya dianggarkan, Pemerintah Pusat harus bertanggungjawab atas sedikit di bawah 9 persen dari keseluruhan kegiatan konstruksi pada tahun 2008.

Dalam usulan anggaran perbaikan tahun 2008, pengeluaran pembangunan meningkat pada tahun 2008 sebesar separuh dari jumlah yang dianggarkan. Peningkatan tersebut, setelah realisasi pengeluaran pembangunan tahun 2007, besarnya mencapai 10 persen lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dan sedikit lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan pada tahun 2006. Pemerintah juga mengharapkan peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran sosial pada tahun 2007 (33 persen) setelah peningkatan pada tahun lalu sebesar 24 persen. Pengeluaran sosial yang terealisasikan cenderung mendekati jumlah yang dianggarkan.

**Tabel 8. Neraca Keuangan Pemerintah Pusat**  
(Bagian dari PDB)

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>
	(Aktual)	(Anggaran)	(Realisasi awal)	APBN	RAPBN-P
<b>Penerimaan</b>	19.1%	19.1%	18.7%	17.7%	19.6%
Pajak DN Non-minyak	10.6%	12.0%	11.3%	12.2%	12.3%
Pajak pendapatan	5.0%	5.8%	5.1%	6.1%	5.8%
VAT	3.7%	4.3%	4.1%	4.3%	4.6%
Minyak & gas	6.0%	4.8%	4.5%	3.6%	4.6%
Lain-lain	2.5%	2.3%	3.0%	1.9%	2.7%
<b>Pengeluaran</b>	20.0%	20.2%	20.0%	19.4%	21.6%
Pemerintah Pusat	13.2%	13.4%	13.3%	13.1%	15.0%
Personil	2.2%	2.7%	2.4%	3.0%	3.1%
Material	1.4%	1.9%	1.4%	1.2%	1.3%
Pembayaran bunga	2.4%	2.3%	2.1%	2.1%	2.1%
Subsidi	3.2%	2.7%	4.0%	2.2%	4.9%
Bantuan Sosial	1.2%	1.4%	1.3%	1.6%	1.2%
Lainnya	1.1%	0.5%	0.4%	0.7%	8.6%
Modal	1.6%	1.9%	1.7%	2.4%	2.0%
Transfer ke wilayah	6.8%	6.8%	6.7%	6.3%	6.6%
<b>Defisit Utama</b>	1.5%	1.2%	0.8%	0.4%	0.1%
<b>Difisit anggaran</b>	-0.9%	-1.1%	-1.3%	-1.7%	-2.0%
<b>Pembiayaan Neto</b>	0.9%	1.1%	1.3%	1.7%	2.0%
Obligasi	1.1%	1.1%	1.5%	2.1%	2.7%
Pembiayaan resmi	-0.8%	-0.4%	-0.6%	-0.4%	-0.4%
<b>Asumsi (aktual tahun 2006):</b>					
Pertumbuhan PDB (%)	5.5%	6.3%	6.3%	6.8%	6.4%
Inflasi (%)	8.0%	6.5%	6.6%	6.0%	6.5%
Nilai tukar (Rp/US\$)	9,141	9,300	9,140	9,100	9,150
Harga Minyak (US\$/bbl)	64.00	63.00	69.69	60.00	83.00

Sumber: Departemen Keuangan

**7. Melambannya pertumbuhan ekonomi dunia serta risiko yang semakin meningkat mempersulit pembuatan proyeksi hasil untuk tahun 2008 dan 2009**

Indonesia diharapkan dapat melewati peristiwa perlambatan pertumbuhan ekonomi global dengan cukup baik, di mana pertumbuhan melamban menjadi 6,0 persen pada tahun 2008 sebelum kembali mencapai 6,4 persen pada tahun 2009 (Tabel 9). Proyeksi-proyeksi tersebut memperkirakan pertumbuhan ekspor melamban dari 8,0 persen pada tahun 2007 menjadi 7,0 persen pada tahun 2008, namun meramalkan permintaan dalam negeri dan terutama investasi dan konsumsi akan tetap mantap ketika momentum ekonomi terus berlanjut pada tahun 2008. Dengan harga BBM internasional dan subsidi yang lebih tinggi, defisit anggaran diproyeksikan menjadi lebih dari 2 persen dari PDB dengan rasio utang-terhadap-PDB menurun menjadi 32 persen menjelang akhir tahun 2008 dan terus menurun selama tahun 2009.

**Tabel 9: Prakiraan Dasar untuk Perekonomian Indonesia**

	2006	2007	2008	2009
Pertumbuhan PDB	5.5	6.3	6.0	6.4
Pertumbuhan ekspor aktual NIA	9.4	8.0	7.0	8.6
Pertumbuhan investasi tetap	2.5	9.2	10.5	10.0
Rekening Lancar BOP (% dari PDB)	2.7	2.5	1.7	0.9
Neraca Modal BOP (% dari PDB)	0.7	1.4	1.3	1.6
Cadangan devisa (Milyar \$)	42.6	52.9	71.8	87.0
Perimbangan Pemerintah Pusat (% dari PDB)	-0.9	-1.3	-2.2	-2.1
Hutang Pemerintah (% dari PDB)	39.6	34.4	31.9	30.3
Inflasi Indeks Harga Konsumen (%)	13.1	6.6	6.5	5.5
Tingkat suku bunga kebijakan Utama (1 m SBI)	12.0	8.0	7.5	7.25

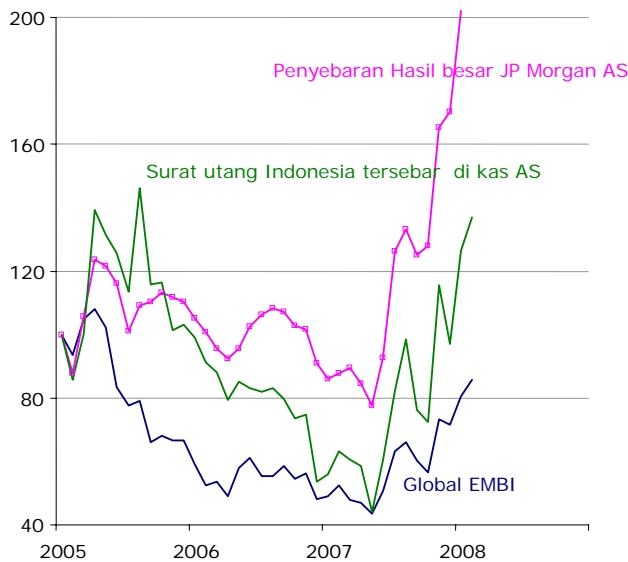
**Akan tetapi, terdapat risiko negatif yang cukup besar.** Prakiraan tersebut memperkirakan adanya penurunan global yang tidak terlalu besar dan tidak berlangsung lama (lihat Tabel 1). Prakiraan tersebut juga memperkirakan bahwa harga minyak dan pangan pada tahun 2008 akan menurun dari tingkat harga yang cukup tinggi saat ini, sekalipun tidak sampai pada level yang dicapai pada tahun 2006. Dengan skenario tersebut, harga komoditas yang tinggi terus memberikan insentif untuk mengembangkan hasil sedangkan permintaan dalam negeri yang cukup besar melindungi pertumbuhan dari penurunan pada permintaan dunia secara keseluruhan. Namun Indonesia masih tetap rentan. Selain itu, peningkatan harga komoditas dan harga minyak lebih lanjut juga menimbulkan risiko apabila efek yang berkaitan dengan keuangan dan pendistribusian tidak dikelola secara tepat.

**Gejolak yang tajam dan berkepanjangan di pasar modal dapat mengakibatkan timbulnya harga yang lebih mahal di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan keuangan meskipun fondasi makroekonomi Indonesia cukup baik.** Karena pasar untuk surat utang negara di Indonesia masih relatif baru, Indonesia menjadi sangat sensitif terhadap peningkatan premi risiko global. Semenjak bulan Juni 2007, premi risiko internasional, yang telah merosot dari 489 bps pada awal tahun 2003 menjadi 130 bps yang kemudian menjadi lebih dari dua kali lipat sehingga lebih dari 300 bps pada awal tahun 2008 (Gambar 19). Secara paralel, suku bunga dalam negeri untuk pinjaman

pemerintah telah meningkat dari di bawah 9 persen pada pertengahan tahun 2007 menjadi di atas 10 persen pada tahun 2008 (untuk obligasi dengan periode selama 10 tahun).

**Gambar 18: Sebaran pada Pemerintah Republik Indonesia telah melebar akhir-akhir ini, tapi hanya sampai tingkat yang dicapai pada tahun 2005**

Indeks, Januari 2005=100



Sumber: Bloomberg, Bank Dunia

Meskipun merupakan pendorong pertumbuhan di Indonesia, harga komoditas yang terus tinggi juga menimbulkan risiko, jika efek yang berkaitan dengan keuangan dan pendistribusian tidak dikelola secara tepat. Harga komoditas yang tinggi sejauh ini telah memiliki pengaruh yang positif terhadap rekening lancar, akan tetapi berdampak buruk pada inflasi, dan perimbangan keuangan dan distribusi pendapatan. Dari sudut pandang distribusi, peningkatan harga pangan dan bahan bakar adalah sumber perhatian karena nilai pangan dan energi besarnya mencapai tiga-perempat dari pengeluaran rumah tangga di antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan dampak yang merugikan dari peningkatan harga tidak diatasi, hal tersebut dapat mengakibatkan risiko keresahan sosial.

**Tingginya harga komoditas dan bahan bakar juga menimbulkan risiko pada sisi keuangan.** Biaya anggaran untuk subsidi energi dan langkah-langkah untuk melindungi konsumen dari peningkatan harga pangan, risiko yang merongrong disiplin fiskal yang sukar dicapai. Dengan skenario tersebut, defisit anggaran kemungkinan akan meningkat, dan mungkin, yang lebih penting adalah pengeluaran untuk prasarana dan bidang-bidang yang sangat penting yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan telah dipisahkan.

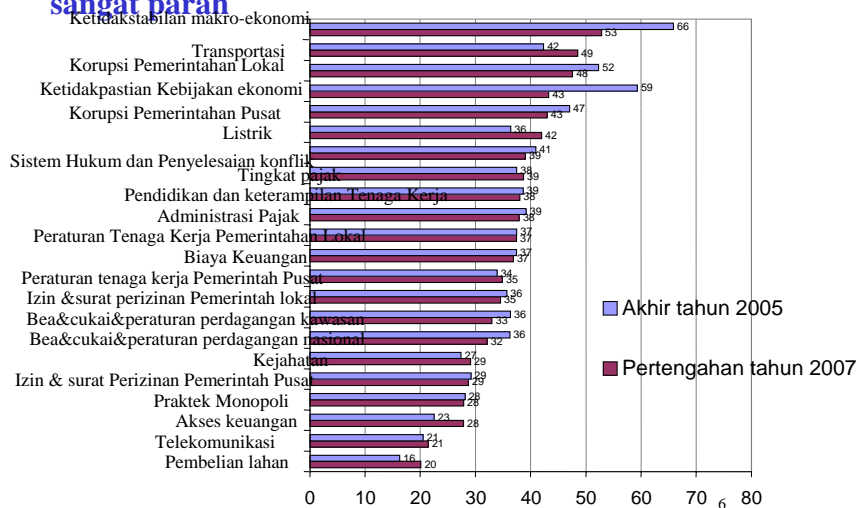
## BAB II: PERKEMBANGAN TERKINI MIKROEKONOMI DAN SEKTOR SOSIAL

### 1. Iklim investasi Indonesia terus meningkat tetapi dengan beberapa daerah utama dengan kelemahan yang berlanjut

Persepsi bisnis tentang iklim investasi Indonesia menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun belakangan ini, yang bertepatan dengan pertumbuhan pesat dari fakta investasi yang terealisasi dalam data makro-ekonomi. (Gambar 19) Peningkatan terbesar yang dirasakan seperti yang dilaporkan dalam peninjauan bisnis telah berada dalam stabilitas makro-ekonomi dan kepastian kebijakan ekonomi. Korupsi, kelemahan sistem hukum, pajak, dan isu tenaga kerja, terus menduduki posisi atas sebagai hambatan menjalankan bisnis. Satu-satunya indikator suasana bisnis yang semakin memburuk pada tahun-tahun ini terkait dengan prasarana. Transportasi, listrik, dan telekomunikasi dirasakan sebagai masalah yang lebih serius pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2005.

Gambar 19. Prasarana meruakan salah satu aspek dari iklim investasi yang merosot

#### Persentase responden yang melaporkan tingkat rintangan yang sedang, parah, atau sangat parah



Survei-survei yang dilakukan oleh investor asing juga menunjukkan bahwa persepsi tentang Indonesia terus meningkat. Peringkat Indonesia dalam survei tahunan JBIC terhadap 600 perusahaan multinasional Jepang meningkat pada tahun 2007 setelah melorot selama 4 tahun berturut-turut.<sup>4</sup> Perusahaan-perusahaan multinasional Jepang memposisikan Indonesia sebagai negara ke delapan yang paling menjanjikan untuk bisnis luar negeri pada tahun 2007, naik dari posisi ke sembilan pada tahun 2006. Akan tetapi, hal tersebut masih merupakan posisi yang rendah dibandingkan dengan posisi keempat yang pernah dicapai Indonesia pada tahun 2002.

<sup>4</sup> "Laporan survei terhadap kegiatan operasi bisnis luar negeri oleh perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang," Bank Jepang untuk kerja sama internasional di bulan November 2007.

**Penerapan paket kebijakan ekonomi pemerintah bulan Juni tahun 2007 (Inpres 6/2007) mungkin merupakan penyebab dari beberapa peningkatan dalam persepsi tentang iklim investasi Indonesia.** Reformasi-reformasi yang signifikan telah mulai dilakukan dalam administrasi pajak, termasuk pembayaran restitusi PPN yang terutang sebesar lebih dari 10 triliun rupiah kepada perusahaan-perusahaan ekspor dan mulai diterapkannya sistem baru yang menjanjikan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 7 hari kepada wajib pajak “spesial”, dalam jangka waktu 2 bulan untuk eksportir dengan risiko rendah dan 4 bulan untuk eksportir dengan resiko menengah. Prosedur pengoperasian standar untuk sistem pengelolaan pengaduan telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dan kode etik untuk para pejabat pajak telah pula diterbitkan dalam SK Menteri Keuangan yang didukung oleh surat edaran Direktur Jenderal Pajak.(SE-33/PJ/2007).

**Reformasi bidang bea dan cukai juga berkembang dengan penerapan izin impor secara elektronik (*paperless*) untuk perusahaan yang memiliki jalur prioritas di pelabuhan utama, Tanjung Priok, Jakarta<sup>5</sup>** Impor dari perusahaan besar yang memiliki jalur prioritas, yang besarnya 15 persen dari surat pemberitahuan impor di Tanjung Priok, hanya dikenakan pemeriksaan pasca perizinan dan bea impor dibayarkan secara periodik untuk beberapa pengiriman bukan untuk setiap pengiriman, yang memungkinkan perizinan pelabuhan dan pabean secara cepat. Penerapan *Indonesia's National Single Window* (INSW) untuk perdagangan juga mencapai kemajuan, dengan dimulainya proyek percobaan di Tanjung Priok pada bulan Desember 2007. Proyek percobaan secara elektronik menghubungkan 5 instansi pemerintahan yang berbeda yang terlibat dalam perizinan impor sehingga importir berisiko rendah dapat memperoleh izin tunggal melalui INSW tanpa membutuhkan izin terpisah dari setiap instansi.<sup>6</sup> Kontak langsung antara pedagang dan pejabat menjadi berkurang. Importir berisiko rendah dan tinggi akan dilibatkan dalam percobaan INSW secara bertahap selama tahun 2008 dan instansi pemerintah tambahan akan dihubungkan ke *single window* belakangan pada tahun ini. Rencana-rencana yang berlaku saat ini adalah untuk menjalin hubungan dengan 5 negara lain di kawasan ini pada tahun 2009 sebagai bagian dari *ASEAN Single Window*.

**Pemerintah mengumumkan suatu reformasi besar-besaran atas prosedur pendirian perusahaan di Indonesia pada bulan September 2007.** Calon Investor yang tidak akan lagi diminta untuk membuka rekening bank dan menyetorkan modal disetor mereka sebelum meminta pengesahan perusahaan baru di Departemen Kehakiman. Sebagai gantinya, mereka dapat menggantikannya dengan keterangan tertulis dari pendiri perusahaan, direksi, dan komisaris, atau rekening bersama atas nama para Pendiri. Hal tersebut akan menghindari kebutuhan untuk memperoleh surat dari pengelola gedung, surat keterangan domisili dari kantor pemerintah setempat, dan nomor NPWP sebelum mendirikan perusahaan baru, dan akan mendorong peralihan dari pemrosesan perijinan secara bertahap ke pemrosesan sejajar. Departemen perdagangan mendukung reformasi tersebut dengan menetapkan batas waktu selama 3 hari untuk menerbitkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP), yang diwajibkan bagi

<sup>5</sup> Laporan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk kira-kira 60% dari perdagangan internasional Indonesia.

<sup>6</sup> Lima agensi berpartisipasi pada bulan Desember 2007 di Proyek Percobaan *Indonesia National Single Window* adalah bea dan cukai, Kementerian Perdagangan, Pangan dan Obat-obatan, dan 2 agen karantina.

seluruh perusahaan baru. Apabila diterapkan secara penuh, langkah reformasi tersebut dapat mengurangi waktu beberapa minggu untuk menjalankan perusahaan baru dan mengurangi biaya, dan dengan demikian akan mempermudah usaha kecil untuk beralih dari sektor ekonomi informal ke sektor formal. Namun demikian, keterlambatan penerapan oleh pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas penerbitan izin usaha berdasarkan otonomi daerah (termasuk SIUP dan TDP) dapat mengurangi dampak reformasi tersebut.

**Undang-undang baru tentang informasi dan transaksi elektronik telah disahkan oleh DPR pada bulan Maret 2008.** Undang-undang tersebut, yang telah dibahas oleh DPR sejak tahun 2005, memungkinkan diterimanya catatan elektronik sebagai bukti sah di pengadilan. Hal tersebut memungkinkan pengurangan dokumentasi tertulis, yang sehingga mungkin akan menghilangkan rintangan untuk penerapan *eGovernment*, perijinan pelabuhan dan pabean tanpa kertas, prosedur perijinan dan persetujuan tanpa kertas. Sistem elektronik dapat mengurangi kebutuhan pertemuan langsung antara pemakai dan petugas. Pada bulan Maret 2008, Departemen Keuangan juga mengeluarkan keputusan (PMK) no. 43/2008 yang memungkinkan perlakuan atas aset sesuai dengan nilai buku daripada nilai pasar pada saat penggabungan usaha. Hal tersebut akan membuat perusahaan terhindar dari kewajiban pajak sebesar 30 persen atas perolehan modal dari revaluasi aset. Namun demikian, keputusan tersebut hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa atau perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran publik perdana.

**Salah satu bidang yang tetap menjadi kelemahan utama dalam iklim investasi adalah pertambangan.** Tidak ada kontrak karya untuk investasi pertambangan internasional besar yang ditandatangani selama 10 tahun terakhir ini. Sebuah survei yang dilakukan baru-baru ini atas perusahaan pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa investasi pertambangan merosot dari 2,2 milyar dolar Amerika Serikat pada tahun 1998 menjadi 964 milyar dolar Amerika Serikat pada tahun 2006, dengan penurunan yang sangat tajam khususnya pada pengeluaran eksplorasi pada lahan yang belum pernah diolah.<sup>7</sup> Perusahaan-perusahaan tambang dunia menempatkan Indonesia di antara 10 tujuan teratas di dunia terkait dengan potensi geologis, namun 10 dari paling bawah (dari 64 negara/wilayah) terkait dengan kebijakan tentang bahan tambang. Faktor utama yang menghalangi investasi pertambangan antara lain lambannya penyelesaian RUU pertambangan yang telah tersangkut di DPR selama beberapa tahun. UU yang baru tersebut mungkin akan menghapuskan mekanisme kontrak karya yang telah memberikan keamanan relatif bagi para investor internasional selama 30 tahun terakhir. Sebelum adanya kejelasan tentang apa yang akan menggantikan Kontrak Karya, para investor internasional menemukan kesulitan untuk menegosiasikan kontrak baru. Masalah lain yang menjadi sumber kekhawatiran iklim investasi pertambangan antara lain adalah konflik antara operasi pertambangan dan peraturan kehutanan, kewenangan yang tumpang tindih antara Pemerintah Daerah dan Pusat dan masalah pajak. Kegagalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk menangkap gelombang investasi pertambangan global sebagai reaksi atas lonjakan harga komoditas.

---

<sup>7</sup> *mineIndonesia 2007*, PriceWaterhouseCoopers, December 2007.

**Berbeda dengan Pertambangan, investasi dalam sektor minyak dan gas bumi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah beberapa tahun mengurangi aktivitas.** Data dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengindikasikan bahwa sedikitnya 27 kontrak bagi hasil baru untuk minyak dan gas bumi telah ditandatangani pada bulan Agustus 2007, meningkat dari jumlah rata-rata tahunan sebanyak 11 selama periode 2001-2006. Beberapa lapangan baru diharapkan akan memproduksi pada beberapa tahun berikutnya, termasuk lapangan Cepu milik ExxonMobil dan lainnya di Sumatera Selatan, Maluku dan Sulawesi. Akan tetapi, beberapa penemuan yang menjanjikan berupa lapangan bawah air (*deep water fields*) yang akan membutuhkan waktu selama 7-8 tahun untuk pengembangannya. Bahkan lapangan Cepu, yang berada di darat, diperkirakan akan memproduksi minyak dalam jumlah kecil sampai tahun 2011.<sup>8</sup> Sebagai akibatnya, penurunan tajam pada produksi minyak selama 8 tahun terakhir, yang telah mengalami penurunan dari 1,5 juta barel per hari pada tahun 1999 menjadi sekitar 900.000 pada tahun 2008, kemungkinan akan terus berlanjut.

## **2. Fenomena “pertumbuhan tanpa lapangan kerja” mungkin mengendor dan sektor manufaktur mungkin akan lebih dinamis dari yang diperkirakan sebelumnya**

**Lapangan kerja meluas secara tajam pada tahun 2007.** (Tabel 10) Pengangguran terbuka menurun secara tajam sampai ke tingkat yang paling rendah sejak tahun 2002. Lapangan kerja meningkat sebesar 4,5 juta pekerja, sedangkan angkatan kerja meningkat sebesar 3,5 juta orang – peningkatan pertama sejak tahun 2001. Pertumbuhan lapangan kerja tersebar secara merata di seluruh sektor formal dan informal.

**Perluasan lapangan kerja merupakan kebalikan dari tren pada lima tahun sebelumnya pada saat, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang substansial, kinerja pasar buruh Indonesia tidak memuaskan.** Sejak tahun 2002, GDP riil telah tumbuh sebesar 5 hingga 6 persen setiap tahun dengan tingkat inflasi sedang. Namun demikian, pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan penciptaan lapangan kerja di sektor formal berjalan lambat. Selain itu, pertumbuhan upah riil menjadi stagnan sejak tahun 2004. Pengangguran terbuka hanya merupakan bagian dari masalah tersebut. Mungkin hal yang lebih serius adalah adanya fakta bahwa lebih dari 40 persen angkatan kerja Indonesia mata pencahariannya masih berasal dari kegiatan yang produktivitasnya rendah di bidang pertanian dan bidang terkait, suatu bagian yang tetap kuat sejak terjadinya krisis pada tahun 1998. Akan tetapi, bahkan pada bidang ini, terdapat tanda-tanda kemajuan pada tahun 2007, karena jumlah pekerja di bidang pertanian menurun.

**Sebagian besar peningkatan lapangan kerja berasal dari wanita yang sebelumnya menganggur atau tidak bekerja.** Lapangan kerja meningkat sebesar 1 juta untuk pria dan 1,4 juta untuk wanita. Angka persentase pengangguran wanita menurun sebesar 2,6,

<sup>8</sup> Cepu diharapkan untuk beroperasi pada akhir tahun 2008, memproduksi 20.000 barel per hari pada tahun 2009 dan 2010, dan mencapai 165.000 barel per hari pada tahun 2011.

yang merupakan hal yang sangat luar biasa mengingat peningkatan angka persentase sebesar 2,2 pada partisipasi buruh perempuan.

**Tabel 10. Kinerja pasar buruh Indonesia saat ini**  
(persen)

	Agustus 06	Agustus 07	Perubahan
<b>Angka Pengangguran</b>	10,3	9,1	-1,2
Laki-laki	8,5	8,4	-0,1
Perempuan	13,4	10,8	-2,6
<b>Angka partisipasi angkatan kerja</b>	66,2	67,0	0,8
Laki-laki	84,2	83,7	-0,5
Perempuan	48,1	50,3	2,2
<b>Persentase pekerja</b>			
Pegawai	28,1	28,1	0,0
Wiraswasta	55,0	54,6	-0,4
Pekerja rumah tangga tidak dibayar	16,9	17,3	0,4
Pertanian	42,0	41,2	-0,8
Industri	18,6	18,8	0,2
Jasa	39,4	40,0	0,6

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional.

**Upah konstan riil juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan lapangan kerja.** Setelah terjadinya inflasi, upah minimum menurun secara tajam dan upah secara keseluruhan pada umumnya tetap konstan. Upah sedikit meningkat untuk buruh tani dan pekerja bangunan, tetapi agak menurun untuk penata rambut dan pembantu rumah tangga karena ada lebih banyak wanita yang memasuki pasar buruh tersebut (Tabel 11).

**Table 11. Pertumbuhan upah riil**  
(dari tahun ke tahun)

	Agustus 2005	Agustus 2006	Agustus 2007
Buruh tani	0,4%	-3,1%	0,9%
Pekerja bangunan	0,4%	-3,1%	0,9%
Penata rambut wanita	-1,4%	-1,2%	-1,2%
Pembantu rumah tangga	3,7%	-6,6%	-3,5%
Upah minimum rata-rata	-1,4%	3,2%	-10,6%

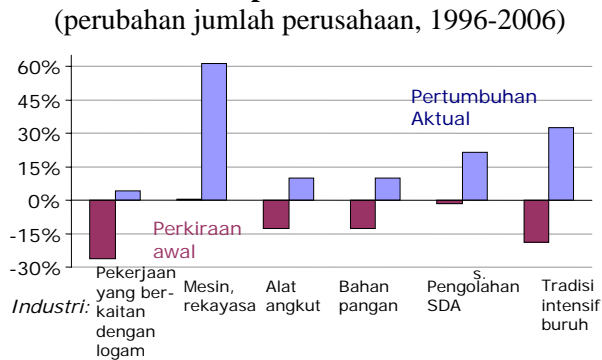
Sumber: BPS, Indikator Ekonomi

**Kemajuan lebih lanjut akan memerlukan perubahan atas peraturan pasar buruh Indonesia yang menghambat terciptanya lapangan pekerjaan tetapi reformasi yang bersifat substansial terhadap peraturan ini kemungkinan akan ditunda sampai selesainya pemilihan umum tahun 2009.** Upaya-upaya untuk memperbaiki Undang-Undang buruh pada awal tahun 2006 dibatalkan karena menghadapi protes politik yang meluas yang dilakukan oleh serikat buruh, sehingga pemerintah enggan untuk melakukan

reformasi pasar buruh secara ekstensif sampai berakhirnya pemilihan umum.<sup>9</sup> Namun demikian, pada bulan terakhir terdapat gerakan diskusi bilateral secara langsung antara APINDO, Asosiasi pemberi kerja utama, dengan beberapa serikat buruh. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah perkembangan awal ini pada akhirnya akan berhasil, tetapi paling tidak perkembangan tersebut layak untuk diperhatikan karena merupakan upaya untuk menerobos jalan buntu politik yang selama ini telah menghambat kemajuan.

**Sektor manufaktur dapat menjadi lebih dinamis dari yang diperkirakan sebelumnya.** Survei industri (SI) melaporkan adanya penurunan jumlah perusahaan selama lebih dari 10 tahun terakhir, tetapi survei terakhir yang lebih menyeluruh mengindikasikan bahwa survei industri tidak mencantumkan sekitar sepertiga perusahaan.<sup>10</sup> Misalnya survei pada tahun 2005 mencatat sebanyak 20.403 perusahaan, tetapi jumlah tersebut secara signifikan kurang dari Sensus pada tahun 2006 yang melaporkan sebanyak 30.356 perusahaan.

**Gambar 20. Survei yang lebih baik mengindikasikan adanya pertumbuhan yang tinggi dalam jumlah perusahaan sejak tahun 1996, bukan penurunan seperti yang sebelumnya diperkirakan**



Secara umum SI tidak melibatkan perusahaan-perusahaan kecil dengan jumlah pegawai kurang dari 50 orang dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sektor padat karya: pengolahan makanan dan minuman, pakaian jadi, tekstil, pengolahan tembakau, furnitur, dan bahan tambang bukan logam. Yang menarik adalah sepertinya tidak terdapat perubahan yang signifikan pada pendistribusian sektor struktur industri selama lebih dari 10 tahun terakhir (dihitung berdasarkan jumlah perusahaan) walaupun sepertinya terdapat sebagian besar perusahaan kecil dan perusahaan-perusahaan secara relatif lebih terkonsentrasi di Jawa tengah dan Jawa Barat dibandingkan dengan yang diperkirakan sebelumnya. Sektor-sektor padat karya bersama dengan produk berbasis mesin dan teknik mengalami pertumbuhan terbesar dalam hal jumlah perusahaan. Terdapat perusahaan yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya tidak hanya di sektor-sektor padat karya atau padat alam tetapi juga di sektor mesin dan peralatan.

<sup>9</sup> Suatu analisis menyeluruh tentang permasalahan pasar buruh di Indonesia saat ini sedang dipersiapkan. Jumlah perhatian yang signifikan akan terfokus pada pendokumentasian lima tren yang penting dan tren yang menghambat di pasar buruh, yaitu: pertumbuhan pengangguran yang meningkat, non-formalitas yang meningkat, pertumbuhan upah yang stagnan, tingginya pengangguran di kalangan pemuda, dan fragmentasi yang tetap.

<sup>10</sup> Survei ini hanya terfokus pada perusahaan industri sedang dan besar, perusahaan dengan jumlah pegawai lebih dari 20 pegawai.

### **3. Fokus pada program yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pada pemantauan dan evaluasi program tersebut telah meningkat**

**Pemerintah sedang memperluas Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional dan memberikan kontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan pada tingkat kecamatan dan desa.** Program tersebut saat ini mencakup sekitar 68 persen perkotaan dan pedesaan di Indonesia, dengan cakupan penuh yang direncanakan pada tahun 2009. Program pemberdayaan masyarakat tersebut berdasarkan pengalaman Indonesia yang digabungkan dengan program pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat, khususnya Proyek Pengembangan Kecamatan (KDP) dan Proyek Kemiskinan Kota (UPP) yang didanai oleh Bank Dunia. Program-program tersebut terfokus pada perbaikan pemerintahan daerah dan pemberian pelayanan pada tingkat kecamatan dan desa dengan mendorong perencanaan partisipatif dan memberikan hibah dalam jumlah besar. Dana secara umum digunakan untuk infrastruktur produktif yang ekonomis seperti jalan, jembatan, irigasi, sumber mata air bersih atau pendidikan dan kesehatan yang terkait dengan proyek.

**Program bantuan langsung tunai bersyarat Indonesia yang pertama mulai memberikan hasil.** Pada bulan Juli 2007, Indonesia mulai melakukan pengujian atas sebuah program bantuan langsung tunai bersyarat utama, yaitu Program Keluarga Harapan. Program tersebut direncanakan untuk sekitar 500.000 keluarga sangat miskin di tujuh provinsi dan akan memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga tersebut yang bersyarat pada terpenuhinya tujuan kesehatan dan pendidikan mereka. Selama ini program tersebut telah menciptakan dan mempekerjakan pegawai pada Unit Pengelolaan Program Pusat dan Unit Pengelolaan Program Daerah di setiap daerah penerima program tersebut. Lebih dari 1.400 fasilitator tingkat kecamatan telah dipekerjakan untuk menyampaikan program kepada para penerima dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pada tingkat lokal. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan dengan para penerima dan banyak para penerima telah mulai memenuhi kewajibannya berdasarkan program tersebut, khususnya dalam bidang kesehatan. Bukti awal dari lapangan menunjukkan bahwa program tersebut dapat dengan sukses mengubah insentif-insentif dan kemampuan rumah tangga miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan dasar. Satu misi lapangan dinyatakan oleh petugas puskesmas di daerah bahwa *“sebelumnya kami yang menunggu pasien, tetapi sekarang pasien yang harus menunggu kami”*.

**Memperbaiki kinerja program melalui perencanaan target program pengentasan kemiskinan yang lebih baik merupakan tantangan yang berkelanjutan.** Hal tersebut akan menjamin efisiensi program tersebut dalam mencapai tujuan program tersebut. Memperbaiki perencanaan target dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya dengan mengurangi korupsi dan kolusi dalam pemilihan para penerima program, tetap merupakan tantangan yang berkelanjutan bagi Pemerintah. Dengan mengakui perlunya perbaikan kinerja perencanaan target, Pemerintah mempertimbangkan sistem perencanaan target rumah tangga yang lebih baik, termasuk penciptaan daftar perencanaan yang digabung yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin yang memenuhi syarat untuk berbagai program bantuan di masa depan. Selain memberitahukan kebijakan di Indonesia, suatu metodologi yang lebih baik untuk menentukan rumah tangga miskin berpotensi untuk menjadi sarana pembelajaran yang

berharga bagi sebagian besar program bantuan langsung untuk memberantas kemiskinan di seluruh dunia.

**Pemerintah sedang mempersiapkan agenda pemantauan dan penilaian yang ketat di Indonesia** – suatu kerangka kerja perencanaan dan penganggaran baru yang terfokus pada pembuatan kebijakan berbasis bukti telah dikembangkan dan didukung oleh pengaturan kelembagaan yang baru dan amanat hukum. Pemerintah Indonesia baru-baru ini telah membentuk unit Deputi Evaluasi Kinerja (DPE) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagaimana diinstruksikan oleh Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan yang baru, UU No. 5 tahun 2007. Ruang lingkup umum pekerjaannya bertujuan untuk mencapai empat tujuan:

- i) memantau dan mengevaluasi pengelolaan, hasil, dan dampak program nasional dan daerah utama;
- ii) memberikan dasar bagi pengambilan keputusan mengenai proses penganggaran, perencanaan, dan/atau pelaksanaan;
- iii) meningkatkan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya; dan
- iv) mendokumentasikan, memberikan umpan balik terhadap, dan mensosialisasikan pelajaran yang telah didapat.

#### **4. Perkembangan Terakhir program dan kebijakan pendidikan**

**Departemen Pendidikan Nasional telah melakukan tindakan yang signifikan untuk mengurangi biaya pendidikan bagi rumah tangga melalui perencanaan pemberian buku pelajaran secara gratis melalui internet.** Melalui Peraturan Menteri No. 2 tahun 2008 tentang penerbitan buku pendidikan, Pemerintah Indonesia akan membeli hak-hak penerbitan (atau hak cipta) atas buku pendidikan yang akan digunakan pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas secara langsung dari pengarang, sehingga mengurangi biaya atas rangkaian pasokan yang panjang. Buku-buku tersebut akan dipindahkan ke internet dalam bentuk buku elektronik agar para guru, murid, dan orang tua di seluruh Indonesia dapat mengakses secara gratis bahan-bahan pelajaran. Meskipun penetrasi internet tumbuh dengan cepat, akses internet terhadap buku pelajaran masih rendah dan biaya untuk memasang internet masih tinggi dan pendekatan ini menimbulkan beberapa tantangan. Oleh karena itu, selain buku elektronik tersebut, Departemen Pendidikan Nasional akan memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga lain untuk menerbitkan salinan buku/teks tersebut dan untuk menjual dengan harga yang terkendali. Menurut ayat 11 dalam peraturan tersebut, “koperasi sekolah” hanya dapat menjual buku-buku yang hak penerbitannya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Walaupun terdapat pertentangan dari para penerbit, upaya Pemerintah dalam menyediakan buku-buku pelajaran dengan harga yang telah dikurangi akan membuat sekolah menjadi lebih murah

**Mahkamah Agung baru-baru ini memutuskan bahwa gaji guru harus dimasukkan ketika menghitung “aturan 20 persen” untuk pengeluaran pendidikan.** Pada tahun 2002, dikeluarkan amandemen atas UUD yang menyatakan bahwa paling tidak 20 persen dari anggaran nasional maupun anggaran daerah harus dialokasikan untuk pendidikan. Undang-Undang yang dikeluarkan berikutnya pada tahun 2003 mengindikasikan bahwa

gaji untuk tenaga pendidikan tidak termasuk dalam sasaran dari anggaran sebesar 20 persen tersebut. Karena gaji tidak termasuk dalam pengeluaran pendidikan, program yang baru dan penting untuk memberikan peningkatan gaji bagi guru yang memenuhi syarat secara resmi akan disingkirkan oleh pengeluaran untuk infrastruktur sekolah. Dengan sasaran yang lebih realistis untuk pengeluaran pendidikan, tantangan baru bagi Pemerintah yaitu menggunakan pendanaan secara efisien agar pengeluaran pendidikan dapat digunakan secara berkelanjutan.

### **BAGIAN III: HAL KHUSUS DALAM AGENDA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG INDONESIA**

#### **1. Dampak konflik, tsunami dan rekonstruksi terhadap kemiskinan di Aceh<sup>11</sup>**

**Bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 membawa dampak yang merusak perekonomian Aceh.** Pada tahun 2005 PDB daerah menurun sebesar lebih dari 10 persen, dan semua sektor ekonomi utama (pertanian, industri manufaktur, konstruksi) menurun antara 4 dan 16 persen. Kerusakan dan kerugian diperkirakan lebih dari US\$4 milyar, dengan kerusakan dan kerugian penting di sektor perumahan (US\$1,4 milyar), infrastruktur perhubungan (US\$0,5 milyar) dan sektor-sektor produktif lainnya (US\$1,2 milyar). Masyarakat dunia, dipimpin oleh pemerintah Indonesia, mengerahkan upaya rekonstruksi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara berkembang, dengan penggunaan dana hampir mencapai US\$8 milyar, cukup untuk ‘membangun Aceh kembali menjadi lebih baik’.

**Angka Kemiskinan di Aceh meningkat pasca bencana tsunami, dari 28,4 persen pada tahun 2004 menjadi 32,6 persen pada tahun 2005.** (Tabel 12) Hal ini terjadi pada angka kemiskinan yang menurun di daerah lain. Peningkatan ini relatif kecil, dibandingkan dengan tingkat kerusakan dan kehancuran yang ditimbulkan dari bencana tsunami dan dapat merefleksikan pengaruh yang bermanfaat dari pemulihan dan upaya rekonstruksi awal. Penurunan angka kemiskinan menjadi 26,5 persen pada tahun 2006, yang lebih rendah dari angka kemiskinan sebelum terjadinya bencana tsunami, menunjukkan bahwa peningkatan angka kemiskinan akibat bencana tsunami terjadi dalam waktu singkat dan kegiatan rekonstruksi dan berakhirnya konflik kemungkinan besar telah mempercepat penurunan ini. Angka kemiskinan di Aceh menurun pada tahun 2006 pada titik di mana tingkat kemiskinan di daerah-daerah lain di Indonesia meningkat. Meskipun demikian, kemiskinan di Aceh tetap secara signifikan lebih tinggi daripada di daerah-daerah lain di Indonesia.

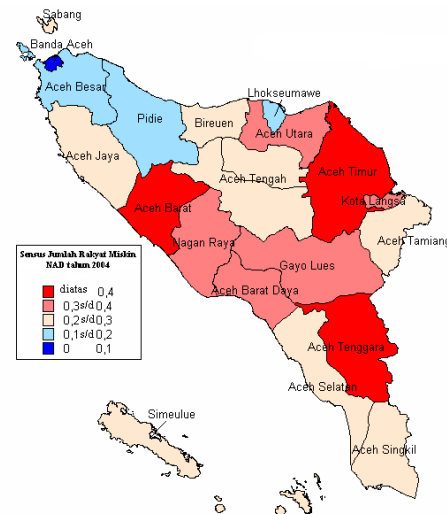
---

<sup>11</sup> Bagian ini menjelaskan ringkasan terpilih dari pesan-pesan utama yang ada dalam Kajian Tingkat Kemiskinan di Aceh yang baru-baru ini diselesaikan oleh Bank Dunia: Bank Dunia (2008), Dampak konflik, tsunami dan rekonstruksi terhadap kemiskinan di Aceh, Jakarta, Januari 2008. Informasi terkini lebih lanjut mengenai kemiskinan di Aceh akan diberikan dalam tersedia dalam Perkembangan Terkini Kondisi Ekonomi Aceh mendatang.

**Data kemiskinan di tingkat provinsi menutupi perbedaan-perbedaan penting dalam angka kemiskinan pada tingkat kabupaten.** (Gambar 21) Data kemiskinan di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan angka kemiskinan tertinggi adalah daerah-daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil, sementara berdasarkan pengamatan, daerah sekitar Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan terendah.

**Dampak bencana tsunami terhadap kemiskinan tidak merata di seluruh provinsi.** Secara signifikan peningkatan kemiskinan yang lebih besar terjadi di daerah-daerah yang terkena dampak hebat dari tsunami serta daerah-daerah yang dilanda konflik. Analisis pada tingkat desa menunjukkan bahwa pada tahun 2005 rumah tangga di daerah-daerah dengan tingkat kerusakan tinggi akibat tsunami dan konflik lebih mungkin secara signifikan menjadi miskin dibandingkan dengan rumah tangga di daerah lainnya.

**Gambar 21. Angka kemiskinan Aceh per kecamatan pada tahun 2004**



Sumber: BPS, 2004.

Akan tetapi, pada tahun 2006 belum ada perbedaan angka kemiskinan yang signifikan antara daerah-daerah yang dilanda tsunami secara langsung dengan daerah yang tidak dilanda tsunami. Dampak konflik terhadap kemiskinan juga nampaknya telah hilang pada tahun 2006. (Tabel 13)

**Tabel 13. Angka kemiskinan relatif menurut klasifikasi kecamatan yang dilanda tsunami dan konflik berat atau ringan, pada tahun 2004-2006**

	2004	2005	2006
Tsunami berat	0,83**	1,44***	1,08
Tsunami ringan	1,00	1,00	1,00
Konflik berat	1,29***	1,43***	0,96
Konflik ringan	1,00	1,00	1,00

*Keterangan:* Perkiraan mencakup pengendalian atas aspek-aspek rumah tangga yang diamati: umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan kepala keluarga serta jumlah anggota keluarga. Perkiraan ini dilakukan berdasarkan kecamatan di kabupaten dan tidak termasuk kecamatan di kota (Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa).

*Sumber:* data BPS dan perhitungan staf Bank Dunia.

**Kemiskinan di Aceh pada intinya merupakan fenomena pedesaan,** seperti di wilayah lain di Indonesia, dengan lebih dari 30 persen rumah tangga pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan, dibandingkan dengan kurang dari 15 persen rumah tangga miskin di daerah perkotaan. Ciri-ciri lain yang berkaitan dengan angka kemiskinan yang lebih tinggi adalah bertambahnya jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, rumah tangga yang dikepalai perempuan dan rumah tangga yang pada intinya bekerja dalam bidang pertanian. Hubungan antara ciri-ciri tersebut dengan kemiskinan relatif tetap stabil selama masa tsunami dan hal ini menunjukkan bahwa faktor pokok yang

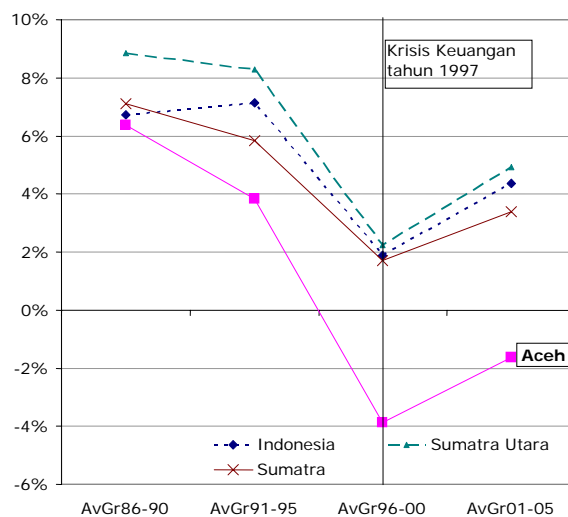
menentukan kemiskinan tidak berubah meskipun faktor sosial ekonomi dan politik berubah dengan pesat.

**Aceh pernah mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat rendah atau negatif selama hampir tiga dekade terakhir, yang dapat menjelaskan peristiwa kemiskinan yang relatif besar di setiap provinsi.** (Gambar 22) Alasan utama dari pertumbuhan yang lebih lamban ini adalah konflik berkepanjangan yang mempengaruhi provinsi tersebut, meskipun kekurangan ekonomi struktural juga turut berkontribusi terhadap kinerja ekonomi yang buruk tersebut. Akibatnya, Aceh memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi daripada daerah-daerah lain di Indonesia. PDB per kapita yang tinggi di Aceh, yang terutama merupakan hasil dari cadangan minyak dan gas di pantai timur Aceh, belum bisa diwujudkan dalam angka kemiskinan yang lebih rendah. (Gambar 23)

**Berlimpahnya sumber daya alam di Aceh tidak menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi ataupun tingkat kemiskinan yang lebih rendah.** Bahkan, kekayaan sumber daya sangat berkaitan dengan konflik telah menghancurkan Aceh lebih dari 30 tahun terakhir dan telah mengakibatkan pergulatan ekonomi, pemerintahan yang lemah, rendahnya tingkat penyediaan layanan umum serta beberapa tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Sumber daya alam semestinya tidak harus menimbulkan konflik. Pembuatan kebijakan yang baik dapat membantu mengurangi kemungkinan bahwa sumber daya akan menimbulkan konflik, seperti dengan berinvestasi di bidang kesehatan dan pendidikan, membuat variasi ekonomi dari ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya alam, meningkatkan keterbukaan dalam distribusi dan penggunaan pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam, menegakkan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi.

**Gambar 22. Perekonomian Aceh terus merosot setelah tahun 1997**

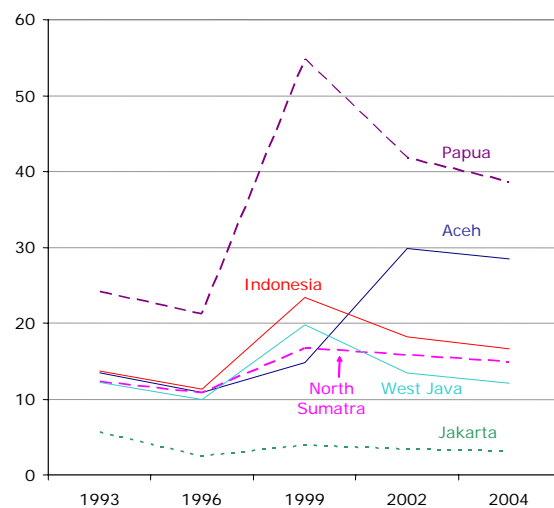
(Laju pertumbuhan tahunan rata-rata)



Sumber: BPS.

**Gambar 23. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang angka kemiskinannya terus meningkat setelah tahun 1999**

(Angka kemiskinan)

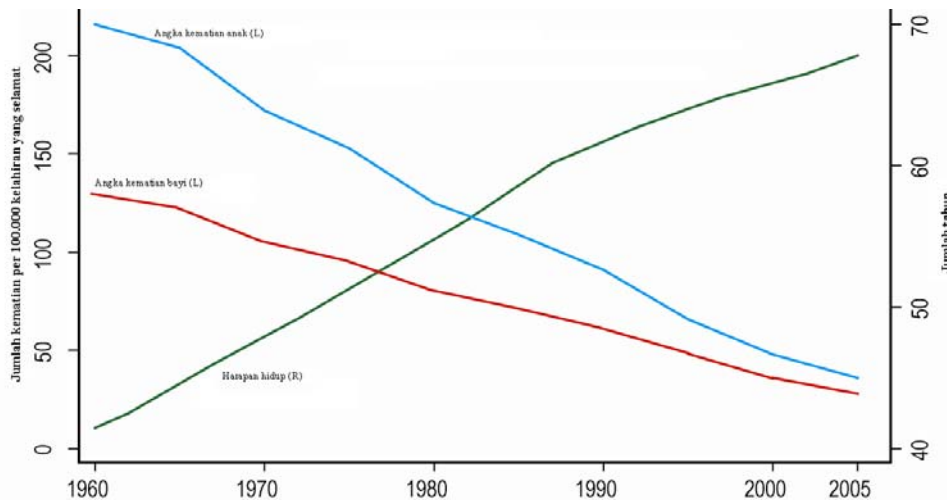


Sumber: Susenas, 2004.

## 2. Investasi dalam bidang kesehatan di Indonesia<sup>12</sup>

**Penduduk Indonesia hidup lebih lama dan angka kematian anak telah menurun secara drastis.** Sejak tahun 1960, angka harapan hidup waktu lahir penduduk Indonesia meningkat dari 40 tahun menjadi 69, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Cina, Thailand atau Turki. Selama periode yang sama, Indonesia telah mengalami penurunan angka kematian anak lebih dari sepertiga dan angka kematian bayi sebesar 25 persen (Gambar 24).

**Gambar 24 Kecenderungan-kecenderungan yang menjadi indikator utama kesehatan Indonesia, pada tahun 1960-2005**



Sumber: Indikator-Indikator Pembangunan dunia 2007

**Akan tetapi, Indonesia terus menunjukkan kinerja yang buruk di sejumlah bidang penting dan, akibatnya, menjadi tidak mungkin untuk mencapai beberapa tujuan pembangunan milenium (MDG) yang berkaitan dengan kesehatan.** Secara khusus, Negeri ini telah membuat sedikit kemajuan dalam mengurangi angka kematian ibu, memperbaiki kekurangan gizi pada anak, dan memusatkan perhatian pada disparitas kesehatan secara geografis:

**Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Negeri ini juga masih mengalami perubahan demografi yang utama yang menuntut sistem kesehatan yang berbeda dan lebih mahal.** Penduduk Indonesia hidup lebih lama dan sedikit anak-anak meninggal karena penyakit menular. Sekarang, komposisi penduduk Indonesia terlihat sangat menyerupai komposisi penduduk di sebagian besar negara-negara di Eropa pada tahun 1950-an dan, pada tahun 2030, jumlah penduduk yang berumur 30-60 tahun akan melebihi jumlah yang berumur 0-30 tahun.

<sup>12</sup> Bagian ini menjelaskan ringkasan terpilih dari pesan-pesan utama yang ada dalam laporan Bank Dunia yang akan datang: Bank Dunia (yang akan datang), Berinvestasi dalam Bidang Kesehatan di Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Pengeluaran Publik di Masa Depan, Jakarta.

**Indonesia sedang melalui masa transisi epidemiologis: jumlah penyakit menular tetap tinggi sedangkan penyakit tidak menular (NCD) meningkat pesat.** Penyakit menular, seperti *tuberculosis* (TBC) dan campak masih tinggi sekalipun menurun, sedangkan penyakit tidak menular, seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker semakin meningkat. Meningkatnya penyakit tidak menular terutama diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pola makan dan gaya hidup.

### *Sistem Kesehatan Indonesia*

Sementara kesehatan tenaga kerja Indonesia sedang tumbuh, distribusi geografis dan kualitas kesehatan terus menghalangi efektivitas sistem, dan masih banyak infrastruktur kesehatan yang kurang baik. Selain itu, apabila dilihat dari peraturan kepegawaian dan desentralisasi yang berlaku, pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas untuk mengatur staf mereka. Di samping itu, pusat-pusat kesehatan sering mengalami kekurangan infrastruktur yang memadai seperti air bersih, sanitasi atau akses tetap untuk mendapatkan listrik. Lebih lanjut, jaminan atas persediaan obat-obatan dasar, pasokan dan peralatan medis tetap menjadi persoalan, khususnya di daerah-daerah terpencil.

**Ketidakefisienan dan buruknya kualitas di bidang kesehatan ini telah menurunkan angka pemanfaatan fasilitas umum maupun pribadi.** Secara keseluruhan penggunaan layanan kesehatan dengan rawat jalan menurun setelah krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997/98 dan tidak dapat pulih kembali, sedangkan pengobatan mandiri semakin meningkat. Angka pemanfaatan layanan rawat jalan di kalangan orang miskin terus menurun, meskipun sejak tahun 2005 dengan adanya program Askeskin hal ini telah membaik, khususnya untuk fasilitas bidang kemasyarakatan. Pemanfaatan rawat inap di Indonesia juga sangat rendah, khususnya di kalangan miskin, yang menggunakan layanan rawat inap 60 persen lebih rendah daripada orang-orang dari kalangan mampu.

### *Pengeluaran dalam Bidang Kesehatan*

Meskipun terjadi peningkatan besar dalam beberapa tahun terakhir, rumah tangga penduduk Indonesia dan pemerintah secara relatif mengeluarkan dana yang lebih kecil untuk bidang kesehatan. Secara keseluruhan, Indonesia membelanjakan kurang dari 3 persen GDP untuk bidang kesehatan (terdiri dari 2 persen untuk swasta dan 1 persen untuk negeri). Sebaliknya, Vietnam, Filipina, Malaysia dan hampir semua negara tetangga lainnya membelanjakan lebih banyak dan menunjukkan angka lebih baik dalam tindakan-tindakan hasil kesehatan yang paling konvensional.

Meskipun hanya berkaitan dengan suatu segmen populasi relatif kecil dan menurun jumlahnya, pengeluaran di bidang kesehatan akibat bencana tetap memiskinkan masyarakat. Hampir 1 persen dari rumah tangga penduduk Indonesia sekarang ini terperosok dalam kemiskinan di setiap tahunnya disebabkan oleh pengeluaran untuk bencana, yang timbul ketika setiap rumah tangga menghabiskan lebih dari 40 persen pendapatannya untuk biaya yang berkaitan dengan kesehatan. Program Askeskin bertujuan untuk melindungi orang-orang miskin dari pengeluaran-pengeluaran dan – meskipun tidak efisien dan salah sasaran – nampaknya mulai menunjukkan hasil.

**Pengeluaran masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan telah meningkat secara pesat, akan tetapi pengeluaran yang meningkat ini belum bisa diartikan sebagai meningkatnya keluaran kesehatan.** Dalam kondisi nyata, pengeluaran total masyarakat telah menjadi tiga kali lipat dari sekitar US\$1 milyar (Rp 9,3 triliun) pada tahun 2001 menjadi lebih dari US\$4 milyar (Rp 39 triliun) pada tahun 2007, pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir melampaui 1 persen PDB. Dampak terbatas dari pengeluaran yang meningkat tersebut adalah sebagian disebabkan oleh kurangnya tuntutan yang ditimbulkan dari kurangnya kesadaran akan kesehatan dan biaya yang relatif tinggi. Hal itu juga disebabkan oleh ketidakefisienan sistem kesehatan itu sendiri, seperti tingginya tingkat kemangkiran dan rendahnya pendidikan tenaga kerja kesehatan, disertai dengan rendahnya kualitas infrastruktur dan disparitas geografis.

**Pada tahun-tahun setelah desentralisasi, setiap provinsi dan kabupaten menghabiskan lebih dari separuh dari total anggaran kesehatan masyarakat.** Hingga tahun 2005, setiap kabupaten bertanggung jawab atas 50 persen dari total pengeluaran untuk kesehatan, dan pemerintah pusat sepertiganya dan provinsi hanya di bawah 20 persen. Pemerintah daerah memiliki kesempatan terbatas untuk membuat keputusan tentang pengeluaran untuk kebutuhan daerah. Banyaknya saluran pendanaan dan perintah khusus yang menyertainya membatasi ruang lingkup pemerintah kabupaten untuk membuat pilihan pengeluaran. Meskipun pada waktu yang sama, sumber daya yang penting di tingkat daerah tetap tidak dikeluarkan, disebabkan oleh kelemahan sistem manajemen keuangan publik dan maka dari itu angka pembayaran menjadi rendah. Sejak tahun 2006, dengan pengenalan program asuransi nasional, Askeskin, distribusi pengeluaran di tingkat pemerintah telah sedikit berubah, yang mengakibatkan pembaharuan penting dalam pengeluaran pemerintah pusat.

### *Pemerataan, Efisiensi dan Pengumpulan Risiko*

**Tingginya angka pengobatan mandiri adalah pendorong utama pemerataan di sektor kesehatan.** Biaya obat yang sering dijadikan resep biasanya lebih tinggi daripada harga yang berlaku secara internasional, yang ditambah lagi dengan tingginya angka pengobatan mandiri, mendorong peningkatan pengeluaran di luar dari anggaran. Peningkatan jumlah orang miskin yang terpaksa menempuh pengobatan mandiri tidak adanya perlindungan asuransi kesehatan yang lebih luas, menjadi faktor pendorong ketidakadilan lainnya dalam pengeluaran di bidang kesehatan.

**Selain itu, pengeluaran di bidang kesehatan masyarakat untuk perawatan sekunder yang terjadi sekarang ini cenderung menurun.** Penggunaan subsidi Negara dan beban pengguna untuk membiayai pemberian perawatan kesehatan kepada masyarakat telah membawa dampak yang merugikan bagi pemerataan di bidang kesehatan. Sampai sekarang pengeluaran di bidang kesehatan masyarakat secara umum telah menguntungkan kelompok kalangan yang lebih kaya daripada orang-orang miskin melalui penurunan subsidi untuk perawatan kesehatan sekunder. Hal ini sebagian dapat ditunjukkan dengan rendahnya angka pemanfaatan atas perawatan rumah sakit oleh orang miskin sementara sebelumnya program Askeskin dihambat oleh tingginya beban pengguna. Akan tetapi, harapannya adalah sifat regresif dari pengeluaran perawatan

kesehatan sekunder dapat secara sebagian dikoreksi melalui program Askeskin, dengan asumsi bahwa program tersebut dapat mencapai target dengan baik.

**Biaya program Askeskin akan terus meningkat dan menambah tekanan pada sisi persediaan.** Meskipun sekarang terjadi penurunan tingkat rawat inap (*bed occupancy*), data administratif yang terkini menunjukkan adanya peningkatan tingkat rawat inap dan mulai menurunnya tingkat rawat inap kelas tiga. Selama sektor swasta tetap tidak termasuk dalam skema tersebut, masalah persediaan mungkin menjadi semakin biasa dan dapat menambah ketidakefisienan dalam penyediaan layanan.

WB20139

C:\Temp\Indonesia Econ Social Update - April 2008 (Indonesia) - Final 1.doc  
15.4.2008 17:06:00